BADAN POM

NO Gratifikasi

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I

Tahun 2023

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju

(0426) 2322759
bpommamuju@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dapat menyelesaikan tugas-tugas selama Triwulan I Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara periodik triwulan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input, output*, dan *outcome*, yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi kinerja dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan Perjanjian Kinerja oleh Balai POM di Mamuju dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Triwulan I Tahun 2023.

Pengukuran kinerja Triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program dan kegiatan terhadap target kinerja, analisis atas efisiensi, penggunaan

sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam melakukan upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2023 dapat tercapai.

Mamuju, 26 April 2023
Kepala Balai POM di Mamuju,

Suliyanto, SH.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 2
1.3. Struktur Organisasi 4
1.4. Aspek Strategis Organisasi 6
1.5. Analisis Lingkungan Strategis 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 Rencana Strategis 19
2.2 Budaya Organisasi 27
2.3 Tujuan 28
2.4 Sasaran Strategis 29
2.5 Rencana Kerja Tahunan 44
2.6 Perjanjian Kinerja 50
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 57
2.8 Kerangka Pendanaan 68
2.9. Metode Pengukuran 73
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 77
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 77
3.2 Analisis Capaian Kinerja 87
3.6 Realisasi Anggaran 205
3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 212
BAB IV PENUTUP 218
4.1 Kesimpulan 218
4.2 Saran 221
LAMPIRAN 223

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai POM di Mamuju Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Tujuan dan sasaran Balai POM di Mamuju dapat dicapai dengan melaksanakan suatu kerja yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan. Anggaran diperlukan sebagai input kegiatan untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Balai POM di Mamuju mendapatkan total anggaran dalam DIPA Tahun 2023 sebesar Rp20.784.898.000 dengan Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.436.251.825 atau 16,53%. Pada Triwulan I Tahun 2023, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja (PK)dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 21 kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen DIPA.

Sampai dengan triwulan I Terdapat 3 Sasaran Kegiatan dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI yaitu:

- SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria capaian TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Selain itu pada triwulan I juga terdapat 2) Sasaran Kegiatan dengan kriteria capaian TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Adapun hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 75,20% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Mamuju perlu melakukan evaluasi target triwulan I agar dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2023
b. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun BPOM di Mamuju sampai triwulan I telah konsistendalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju
c. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun triwulan I tahun 2023 Balai POM di Mamuju telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
d. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 107,92% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

e. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,04% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
f. Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 69,99% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, sehingga perlu dilakukan evaluasi target dan capaian triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
g. Capaian indikator sasaran strategis ketujuh sebesar 275.00% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dan dapat lebih intensif melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat agar pelaku kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dapat menurun
h. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun sampai dengan triwulan I Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
i. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023, namun sampai dengan triwulan I tahun 2023 Balai POM di Mamuju tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
j. Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 104.00% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang akan tercapai di akhir tahun 2023 maka Balai POM di Mamuju harus tetap melakukan kegiatan dalam rangka untuk

menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

k. Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 228,11% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan Tata Kelola Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

l. Dari 21 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 13 kegiatan yang Tidak Efisien. Terkait dengan kegiatan yang tidak efisien hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang selisih antara realisasi kegiatan dan anggarannya terlalu tinggi. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan tingkat efisensi kegiatan Balai POM di Mamuju.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, diantaranya:

- Penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SKP di SIASN yang memfasilitiasi cascading indikator kinerja hingga level individu.
- Budaya Kerjasama tim yang tercipta di Balai POM di Mamuju, sehingga dalam mencapai target dapat dilaksanakan seoptimal mungkin oleh semua kelompok substansi
- Sebagian besar ASN milenial yang responsif dan cepat beradaptasi terhadap perubahan
- Koordinasi dan hubungan kerja sama dengan internal dan lintas sektor yang baik

Balai POM di Mamuju terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun pada triwulan mendatang sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terbitnya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan bahawa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM disebutkan bahwa jenis laporan kinerja yang dilaporkan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Interim merupakan Laporan Kinerja triwulanan yang menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari instansi pemerintah dalam 1 (satu) triwulan, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan. Selain itu dijelaskan terkait kendala atau hambatan dan rencana tindak lanjutnya. Adanya laporan kinerja interim diharapkan target tahunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan dan hambatan-hambatan di tahun berjalan dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Dengan adanya perbaikan diberbagai bidang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang akan dicapai demi kesejahteraan masyarakat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. Balai POM di Mamuju merupakan salah satu UPT Badan POM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai POM di Mamuju dipimpun oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi III dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Mamuju yang berlokasi di Kabupaten Mamuju memiliki cakupan wilayah pengawasan sebanyak 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar (Perka BPOM No 23 Tahun 2021).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijelaskan Balai POM di Mamuju mempunyai **tugas** dan **fungsi** sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.1 di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Balai POM di Mamuju dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Balai POM di Mamuju tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

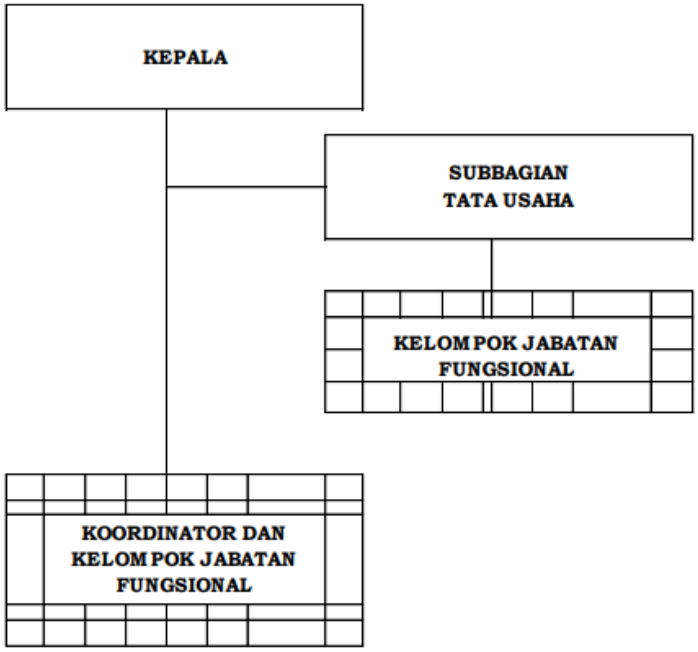

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Mamuju
Sumber: Perka BPOM No 22 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Mamuju didukung Struktur Organisasi, yang terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. **Subbagian Tata Usaha**

   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminanmutu
e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Balai POM di Mamuju sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peran dan fungsi Badan POM yang sangat penting dan strategis dalam mendorong tercapainya agenda prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok kegiatan strategi yang di fokuskan pada 4 (empat) pilar utama, sebagai berikut:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar *(pre-market)* terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balai POM di Mamuju sebagai unit pengawas obat dan makanan di Mamuju perlu melakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja dimasa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Sulawesi Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar,maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai POM di Mamuju sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama, dan tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Mamuju perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus

untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, Distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai POM di Mamuju.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Mamuju untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2023 sejumlah 39 orang dengan proporsi 58,97% perempuan dan 41,03% laki-laki namun terdapat 1 Pegawai Biro Umum BPOM yang penempatannya di Balai POM di Mamuju. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut.

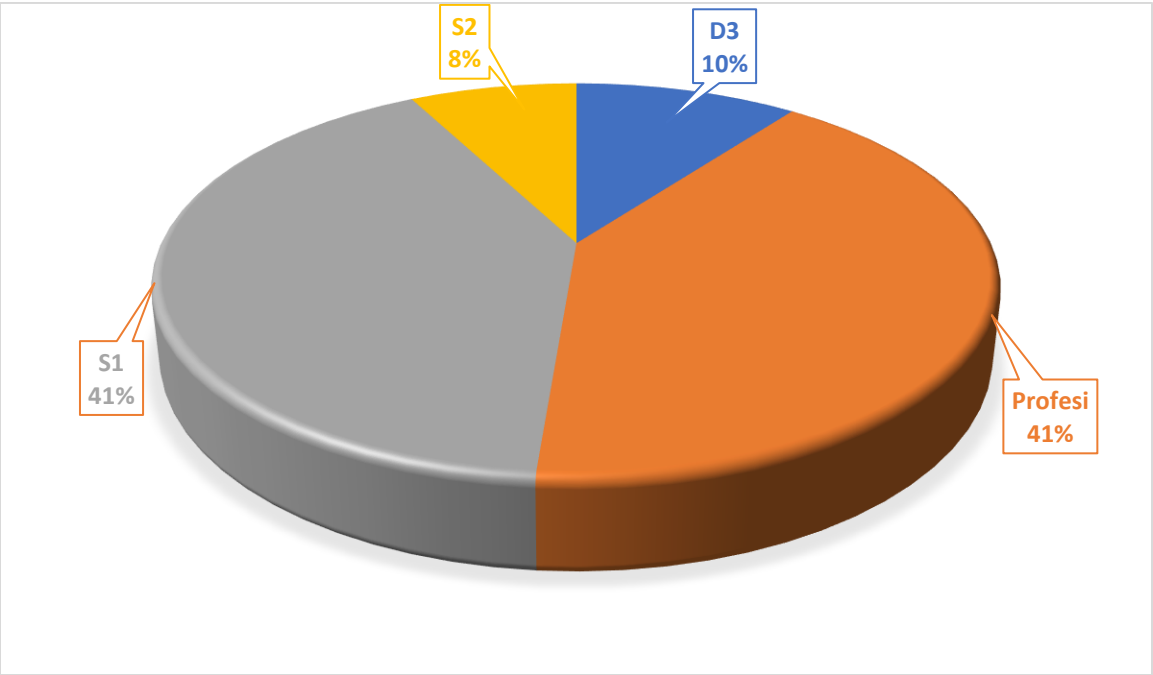

Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Balai POM di Mamuju Bulan Maret Tahun 2023
Sumber: Data Kepegawaian Balai POM di Mamuju Diolah Penyusun, 2023

Sumber Daya Lainnya

Sejak tahun 2017 Balai POM di Mamuju telah menjadi satker mandiri. Dalam melaksanakan operasional kegiatan Balai POM di Mamuju telah

menempati Gedung Baru yang beralamat di Jalan Poros Kalukku KM 13 Desa Bambu. Gedung ini didirikan diatas tanah dengan luas 9109m^2. Gedung yang ditempati untuk operasional kegiatan perkantoran saat ini merupakan realisasi pembangunan tahap 1 (satu) yaitu pembangunan 3 Gedung Laboratorium (Laboratorium Teranakoko, Laboratorium Pangan dan Laboratorium Mikrobilogi) dengan luas bangunan sebesar 1555.2 m^2. Rencana kedepannya akan dilanjutkan untuk pembangunan Tahap 2 yaitu Gedung Kantor dan Gedung Layanan Publik. Tahap ke-3 adalah pembangunan sarana dan prasarana lingkungan lainnya.

Namun adanya Gempa Bumi tanggal 15 Januari 2021 menyebabkan kerusakan berat pada Gedung Laboratorium Mikrobiologi dan kerusakan ringan pada Gedung Laboratorium Pangan dan Teranokoko. Sehingga sebagian besar pengujian masih harus dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar. Selain itu Balai POM di Mamuju mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Anggaran

Anggaran Balai POM di Mamuju bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.419578/2023 yang diterbitkan tangan 30 November 2022 sebesar Rp20.784.898.000 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selama triwulan I tahun 2023 telah dilakukan revisi DIPA namun tidak mengurangi jumlah alokasi anggaran.

Eksternal
Letak Geografis

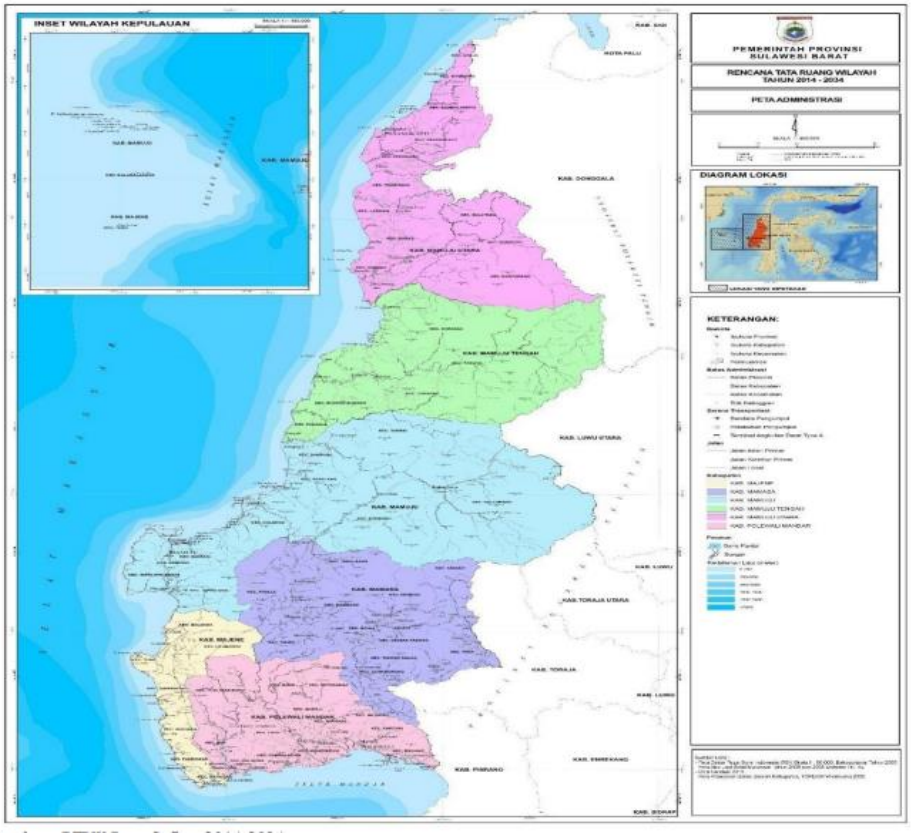

Gambar 1.3 Peta Provinsi Sulawesi Barat
Sumber: Sulbarprov.go.id, 2022

Batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah :
- Sebelah Utara : Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur : Sulawesi Selatan
- Sebelah Selatan : Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km persegi (sulbar.bps.go.id, 2020). Secara administratif Provinsi Sulawesi Barat terbagi menjadi 6 (Enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, terdiri dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) (sulbar.bps.go.id). Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selat Makassar yang

berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan dari aktivitas perdagangan obat dan makanan di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini menjadi poin penting bagi Balai POM di Mamuju untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Beberapa aspek penting yang menjadi *concern* pengawasan Balai POM di Mamuju antara lain :

- Penjualan *online* produk obat dan makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Jalur perdagangan obat dan makanan di Wilayah Indonesia Timur
- Komoditi yang banyak beredar di Sulawesi Barat berdasarkan jumlah dan nilai adalah Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya
- Obat tertentu yang sudah dibatalkan izin edarnya masih ditemukan beredar Sulawesi Barat
- Sulawesi Barat merupakan daerah penghasil produk perikanan dan perkebunan khususnya produk kakao dan minyak sawit sehingga diperlukan pengawasan sebelum diolah dengan bersinergi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang ada

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi industri pangan dan industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS Pemerintah dan Swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan serta Bahan Berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada gambar 1.4. di bawah ini.

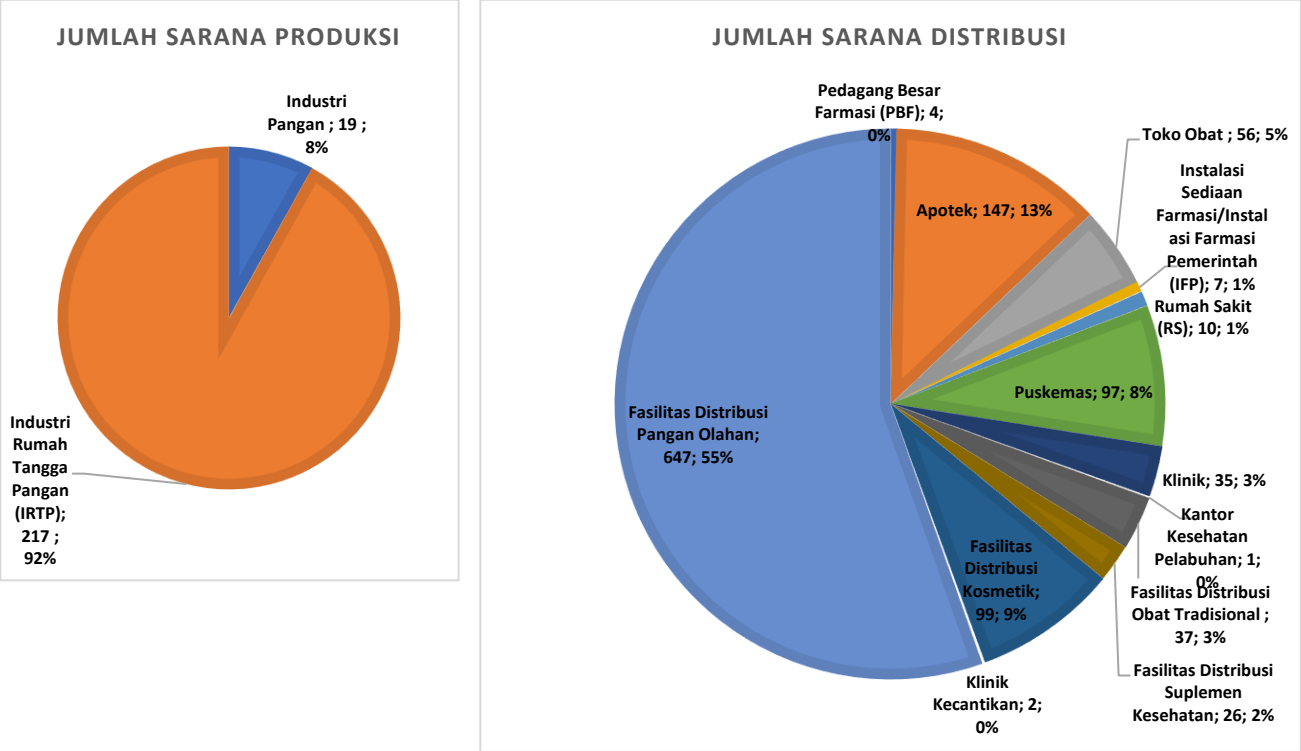

Gambar 1.4 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Tahun Desember 2022
Sumber: Monev Tahun 2022 Diolah Penyusun, 2023

Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Perubahan dinamis pada lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun ekternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Mamuju. Lingkungan strategis dengan berbagai isu strategisnya banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Mamuju tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun isu strategis tahun 2023 diantaranya sebagai berikut.

1. Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)

Sehubungan dengan adanya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang berkembang di masyarakat dimana BPOM mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan adanya sirup obat yang diduga menjadi penyebab kasus GGAPA. Isu kasus tersebut hingga memicu kematian pada anak yang dengan cepat tersebar dan berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran berlebih dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada BPOM sebagai regulator terkait pengawasan obat dan makanan yang dilakukan selama ini. Namun demikian, BPOM menanggapi isu tersebut dengan melakukan langkah-langkah responsif yaitu melakukan investigasi, penelusuran, pengambilan dan pengujian sampel, termasuk pemeriksaan ke sarana produksi. Balai POM di Mamuju sebagai UPT Badan POM juga telah melakukan berbagai upaya penyebaran informasi sebagaimana penjelasan publik/siaran pers BPOM ke masyarakat, sebagai bentuk transparansi penanganan kasus cemaran EG dan DEG. BPOM juga mendukung Kementerian Kesehatan dalam melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab riil kasus tersebut. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor yang kuat juga diperlukan agar pengawasan obat post market ini bisa lebih massif. BPOM juga berkomitmen akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator, guna mengawal mutu, khasiat, dan keamanan obat.

2. Adanya Bencana Gempa Bumi 6.2 Magnitudo Tanggal 15 Januari 2021 di Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan 3 gedung laboratorium dan Talud BPOM di Mamuju mengalami kerusakan. Dari 3 gedung, 1 gedung mengalami rusak berat dan 2 gedung mengalami rusak ringan. Bencana ini menyebabkan terhambatnya kegiatan perkantoran selama kurang lebih 1 bulan hingga status tanggap darurat dicabut dan cukup berdampak pada kinerja Balai hingga tahun 2021 yaitu progress fisik gedung belum 100% dan dilanjutkan penyelesaiannya hingga akhir tahun 2022 sehingga tahun 2023 pengujian bisa dilaksanakan di Lab. Balai POM di Mamuju

3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
   - Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”
     Kontribusi Balai POM di Mamuju pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat, peningkatan akses vaksin Covid-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
   - Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”k hususnya terkait dukungan pengawasan mutu dan keamanan Obat dan Makanan termasuk pengawasan distribusi Vaksin Covid-19 di Sulawesi Barat
   - Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (Health Security)” khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai POM di Mamuju dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai POM di Mamuju; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi Grand Design Penguatan laboratorium BPOM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
   - Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat” melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market, patrol siber,

penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

4. Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Diterbitkannya Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai POM di Mamuju sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. Balai POM di Mamuju melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Sulawesi Barat.
5. Proses distribusi produk yang semakin mudah ke Wilayah Sulawesi Barat termasuk di dalamnya adalah produk illegal
6. Adanya pelabuhan-pelabuhan kecil yang belum dapat dikawal secara intensif oleh Balai POM di Mamuju
7. Semakin banyak produsen peracik kosmetik rumahan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya

8. Maraknya perdagangan Obat, Makanan, Kosmetika dan Obat Tradisional yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau mengandung Bahan Berbahaya secara *Online*
9. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) dan penyalahgunaan obat semakin marak terjadi, distribusi OOT tersebut dilakukan oleh orang perorangan, bukan oleh sarana yang berhak
10. Balai POM di Mamuju saat ini sudah mempunyai laboratorium pengujian, namun 1 (satu) gedung laboratorium mikrobiologi yang digunakan untuk pengujian Covid-19 memiliki kerusakan berat sehingga laboratorium pengujian Covid-19 harus dipindahkan ke gedung laboratorium pangan. Sehingga sampai akhir Tahun 2022 pengujian mikrobiologi dilakukan di BBPOM di Makassar.
11. Balai POM di Mamuju terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasardan kode etik aparatur negara.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa isu yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi Balai POM di Mamuju dalam melakukan pembenahan di masa mendatang dan menyusun strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan adanya Pandemi Covid-19 dan penyesuaian perencanaan akibat Gempa Bumi. Dengan disusunnya strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini diharapkan pencapaian kinerja berikutnya dapat lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, kapasitas Balai POM di Mamuju sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Barat masih perlu terus dilakukan perbaikan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di

masa datang dapat lebih optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih ketat dan baik demi terjaganya keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan. Kemudian kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Mamuju mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis Balai POM di Mamuju yang telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*).

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Perencanaan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Balai POM di Mamuju dalam satu tahun tertentu, dan melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia.

Pendekatan manajemen kinerja dalam Renstra Balai POM di Mamuju menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Perjanjian Kinerja. Mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasiskan organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program.

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Mamuju sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPOM di Daerah dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil *(outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menetapkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran yang harus dilaksanakan oleh Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Mamuju. Adapun penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut.

Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

> ***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise);*
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure;*
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact;*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan Kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha,

dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: Renstra BPOM 2020-2024, 2020

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan

pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 % dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 %.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

   Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

   Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

   Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan

sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas

   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas

   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim

   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif

   Mampumelakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap

   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Mamuju. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		lingkup Balai POM di Mamuju		di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK3	Meningkatnya kepuasan	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Learning and Growth Perspective	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Sumber: Sasaran Kegiatan, 2023

Adapun penjelasan untuk setiap sasaran kegiatan sebagai berikut.

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Strategis Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Mamuju tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan

farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Balai POM di Mamuju. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

1) Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 90% pada akhir tahun 2023
2) Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 88% pada akhir tahun 2023
3) Persentase obat makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 88% pada akhir tahun 2023

4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 84% pada akhir tahun 2023
5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 90% pada akhir tahun 2023

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM dan Balai POM di Mamuju yaitu "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Mamuju melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 75 pada akhir tahun 2023

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Sebagai salah satu UPT dari Lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Mamuju berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Mamuju, mencakup berbagai

hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Mamuju bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 93,40 pada akhir tahun 2023
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 78,01 pada akhir tahun 2023
3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 91 pada akhir tahun 2023

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Mamuju mampu melindungi masyarakat dengan optimal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Mamuju, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Mamuju akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Mamuju mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Mamuju perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2023
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 78% pada akhir tahun 2023
3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 86% pada akhir tahun 2023
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 70% pada akhir tahun 2023
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 70% pada akhir tahun 2023
6) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju, dengan target 4,25 pada akhir tahun 2023
7) Persentase UMKM yang memenuhi standar, dengan target 55,56% pada akhir tahun 2023

b. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 91,30 pada akhir tahun 2023
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 68 sekolah pada akhir tahun 2023
3) Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 25 desa pada akhir tahun 2023
4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 4 pasar pada akhir tahun 2023

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Balai POM di Mamuju merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2023
2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 100% pada akhir tahun 2023

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi

ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Mamuju menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Mamuju melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju, dengan target 99% pada akhir tahun 2023

3. *Learning & Growth Perspective*

1. Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Mamuju sebagai salah satu UPT BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Mamuju akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, Balai POM di Mamuju berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Mamuju agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Mamuju untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Mamuju, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Mamuju. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) Indeks RB Balai POM di Mamuju, dengan target 66 pada akhir tahun 2023
2) Nilai AKIP Balai POM di Mamuju, dengan target 79,40 pada akhir tahun 2023

2. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju, dengan target 83 pada akhir tahun 2023

3. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Mamuju di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP, dengan target 63% pada akhir tahun 2023
2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal, dengan target 2,5 pada akhir tahun 2023

4. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM di Mamuju dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju, dengan target 94,3 pada akhir tahun 2023

2.5 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. RKT memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju. Pentingnya perencanaan yang selaras antara

Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusun dan ditetapkanlah RKT 2023 tanggal 12 Juli 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 disusun mengacu pada Reviu Renstra 2020-2024 tanggal 13 Desember 2021. Berikut ini tabel RKT Tahun 2023.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	90
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	88
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	88
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	84

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**	90
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	75
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	93,4
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	78,01
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	78
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	86
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	70
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di	70

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
				lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4,25
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***	55,56
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	93,1
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	68
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	25
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	4
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa	100

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		lingkup Balai POM di Mamuju		dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	99
Learning and Growth Perspective	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	66
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	79,4
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	83
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	63

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,5
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94,3

Sumber: Dokumen RKT Balai POM di Mamuju Tahun, 2023

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, antara Kepala Balai POM di Mamuju sebagai penerima amanah dengan Kepala Badan POM RI sebagai pemberi amanah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Mamuju sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Mamuju) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Balai POM di Mamuju Tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Mamuju menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Mamuju. Adapun Lampiran Menjadi Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	90
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	88
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	88
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	84
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan	75

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	93,4
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	78,01
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	78
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	86
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	70
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	70
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4,25
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	55,56

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	93,1
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	68
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	25
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	4
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	100
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan	99

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
		kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	
Learning and Growth Perspective	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	66
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	79,4
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	83
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	63
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,5

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94,3

Sumber: Dokumen PK Balai POM di Mamuju, 2023

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau kinerja dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Untuk pemantauan secara berkala, telah dibuat Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja pertriwulan dan perbulan melalui Aplikasi Simetris Modul e-performance.

2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen perencanaan pencapaian kinerja pertriwulan dan perbulan. Adanya dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan sebagai sarana yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja setiap bulan. Diharapkan dengan adanya RAPK capaian kinerja dapat lebih optimal.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
				POM di Mamuju												
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
			IKSK 1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
		Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju												
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,4
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,01

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
				lingkup Balai POM di Mamuju												
			IKSK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
				oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju												
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4,25
			IKSK 4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar***	5	10	10	10	10	30	30	70	70	90	100	55,56
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	IKSK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai	-	-	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93,1

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
		dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		POM di Mamuju												
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di lingkup Balai POM di Mamuju	5	10	20	30	55	55	55	55	70	80	100	68
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	5	10	20	25	25	40	40	40	65	75	85	25
			IKSK 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	5	10	25	55	55	65	75	75	90	100	100	4
	SK6	Meningkatnya efektivitas	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat	4.7	10.75	18.63	25.38	46.75	55.25	64.25	73.75	82.25	90	96.25	100

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
		pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju												
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	6.4	12.75	17.73	26.45	48.26	59.3	70.35	78.49	86.63	94.19	98.26	100
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	5	10	20	30	40	50	55	60	70	80	90	99

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
Learning and Growth Perspective	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,4
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2,5

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target											
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B011	B012
				POM di Mamuju yang optimal												
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	-	20	30	40	50	60	65	70	77	80	85	94,3

Sumber: Dokumen RAPK Balai POM di Mamuju, 2023

2.8 Kerangka Pendanaan

Sesuai Target Kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka Kerangka Pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai POM di Mamuju tahun 2023 berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kerangka Pendanaan Kegiatan 2023

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
Stakeholders Perspective	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	95.342.400
			IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju	30.441.000
			IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	95.342.400
			IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju	30.441.000
			IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	30.473.400
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat	IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat	46.210.500

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju		dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Mamuju	
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	76.306.000
			IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	282.612.100
			IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.050.100
Internal Process Perspective	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai	IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di lingkup Balai POM di Mamuju	22.050.000
			IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	22.050.000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		POM di Mamuju		ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di lingkup Balai POM di Mamuju	37.904.000
			IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	51.200.000
			IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di lingkup Balai POM di Mamuju	186.750.000
			IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	94.955.000
			IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	61.324.000
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup	IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	4.801.409.800
			IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di	499.008.000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		Balai POM di Mamuju		lingkup Balai POM di Mamuju	
			IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di lingkup Balai POM di Mamuju	1.010.490.000
			IKSK5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di lingkup Balai POM di Mamuju	111.585.000
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	124.648.000
			IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju	38.112.800
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju	282.591.500
Learning and Growth Perspective	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di	IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	476.308.500
			IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	316.574.000

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Pendanaan
		Mamuju yang optimal			
	SK9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	388.743.500
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	3.959.758.000
			IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	317.680.000
	SK11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	7.211.537.000
Total					**20.784.898.000**

Sumber :RAPK Balai POM di Mamuju, 2023

2.9. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Setiap akhir periode kegiatan instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pada tahun 2023 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Adapun cara pengukuran dan Kriteria pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Cara Pengukuran % Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut.

$$\%\ Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x\ 100\%$$

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

Cara Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut.

a. NPS Per Sasaran = {%capaian indikator1 + %capaian indikator2 + ...%capaian indikator)n}/ n

Keterangan :

- Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
- Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator → NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.
- Indikator dengan capaian >120%, penghitungan NPS menggunakan nilai maks 120%

b. NPS per Persektif = {%capaian sasaran$_1$ + %capaian sasaran$_2$ + ….%capaian sasaran)$_n$}/ n

Keterangan :

- Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran → NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.

c. NPS Total = {NPS Perspektif$_1$ + NPS Perspektif$_2$ + NPS Perspektif$_3$}/ 3

Keterangan :

- NPS total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan bulanan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam periode pengukuran tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Pada triwulan IV tahun 2022

terdapat perubahan pedoman penyelenggaraan SAKIP BPOM sehingga kriteria yang berlaku sebagai berikut.

Tabel 2.7 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Sumber :Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022, 2023

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk:

1. Mencegah rendahnya penetapan target kinerja tahunan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM
4. Me-*review* penetapan target kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan minimal 1 orang petugas penanggungjawab data di BPOM di Mamuju yang disahkan oleh SK Kepala BPOM

2. Melalui SK Kepala Balai POM di Mamuju kepala balai melakukan penunjukan bahwa ketua tim masing-masing IKU bertanggung jawab terhadap seluruh data yang berkaitan dengan capaian IKU
3. Ketua Tim menginput data kinerja pada bit.ly *data base online* https://bit.ly/SAMBUSA Menu "Monitoring dan Evaluasi" Balai POM di Mamuju secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator data teknis
4. Sekretaris Penanggung Jawab Data Balai melakukan verifikasi dan konfirmasi data dan melakukan penginputan data setiap bulan pada bit.ly RAPK-RHPK UPT, aplikasi SMART DJA, BOC, Monev Bappenas, Aplikasi SAKTI dan aplikasi simetris modul *e-performace*, Matriks Capaian RAPK (bulanan) yang telah disahkan Kepala Balai, Laporan Evaluasi Internal serta Laporan Kinerja Interim setiap triwulan yang diupload ke https://bit.ly/capaianUPTtahun2023
5. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Mamuju guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada RAPK triwulan I tahun 2023 dan terhadap target tahunan 2023 hal ini dilakukan sebagai evaluasi capaian kinerja periodik Tahun 2023. Kemudian dilakukan juga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, rekomendasi dan tindaklanjut dalam setiap pencapaian IKU serta dilakukan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dilakukan terhadap target kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

% Capaian = Realisasi/Target x 100%

Pada RAPK telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan diukur dengan ditetapkannya 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan, yang semua indikator kinerja yang ditetapkan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga dalam pengukuran pencapaian kinerja Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2023 dihitung berdasarkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) IKU dengan target seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tabel 2.4 RAPK Tahun 2023. Berikut ini pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif.

Pada tahun Tahun 2023 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai NPS Total dengan nilai 95,54% dengan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI yang terdiri dari NPS Perspektif *Stakeholder* sebesar 75,20%, NPS *Perspektif Internal Process* sebesar 99,40% dan NPS *Perspektif Learning and Growth* sebesar 112%. Jika dilihat per sasaran terdapat 2 Sasaran Strategis (SS) dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, 5 SS dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, dan 4 SS capaiannya di akhir Tahun. Adapun detail Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Per Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Detail

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,00	90,00	20,00	21,00	95,24	105,82	105,82	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88,00	88,00	2,00	5,00	40,00	45,45	45,45	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88,00	88,00	7,00	7,00	100,00	113,64	113,64	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,00	90,00	10,00	10,00	100,00	111,11	111,11	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							**75,20**	**75,20**	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							-	-	-	-
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,40	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,01	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							-	-	-	-
Stakeholders Perspective							**75,20**	**75,20**	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	78,00	-	-	88,89	113,96	113,96	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86,00	86,00	-	-	100,00	116,28	116,28	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	70,00	6,00	9,00	66,67	95,24	95,24	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	70,00	41,00	48,00	85,42	120,00	120,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,56	10,00	-	-	10,00	100,00	18,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							**107,58**	**93,91**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,01	93,01	-	-	93,16	100,16	100,16	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	68,00	20,00	-	-	20,00	100,00	20,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	25,00	20,00	-	-	20,00	100,00	20,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4,00	25,00	-	-	25,00	100,00	25,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							**100,04**	**41,29**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	18,63	-	-	15,26	81,91	15,26	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	17,73	-	-	10,29	58,06	10,29	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							**69,99**	**12,78**	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	99,00	20,00	-	-	55,00	120,00	55,56	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju							**120,00**	**55,56**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
Internal Process Perspective							**99,40**	**50,88**	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	79,40	-	-	-	-	-	-	-	-
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal							-	-	-	-

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal							-	-	-	-
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,50	2,50	-	-	2,60	104,00	104,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju							**104,00**	**104,00**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94,30	30,00	-	-	68,43	120,00	72,57	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Penyesuaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel						**120,00**	**72,57**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
Learning and Growth Perspective						**112,00**	**88,29**	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
NPS Total						**95,54**	**71,46**	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Sumber : Monev Capaian RAPK 2023 Diolah Penyusun, 2023

Analisa setiap indikator dijelaskan dalam sub bab analisis capaian kinerja masing-masing IKU berikut ini.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN 1

"Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju"

Berdasarkan UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. PadaSK 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, SK 1 terdiri atas 5 (Lima) indikator kegiatan sebagai berikut.

1. Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Berikut akan diuraikan analisa capaian pada setiap Indikator Kinerja SK1.

IKU 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU Persentase Obat yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\%\text{Obat MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Total\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji} x100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,00	95,24	105,82	105,82	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Produk Obat termasuk Obat dan Nappza, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, untuk Capaian Hasil Uji yang Memenuhi Syarat (MS) pada TW-1 -2023 adalah 105,82%, memenuhi ekspektasi yang diharapkan dengan simpulan Efektif.

Sampling dan pengujian sampel Obat, OTSK, Kosmetik dalam penjaminan Keamanan dan Mutu sesuai persyaratan yang ditetapkan pada Catcment area pengawasan BPOM Mamuju, sudah semakin baik, intensif menjangkau pemahaman masyarakat, sehingga peredaran obat di pasaran dapat dikonsumsi dengan aman dan bermutu

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Persentase akhir pemenuhan produk MS berdasarkan Hasil Uji Obat telah terpenuhi, namun dari hasil survey Label dan Penandaan, masih

ditemukan produk yang TMK terutama pada produk OTSK dan Kosmetik, Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam peningkatan pendekatan pengawasan berbasis Pembinaan dan Edukasi kepada Sarana Distribusi dan Produksi untuk dapat menjamin segi keamanan dan kemanfaatan produk beredar.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Perlu terus menggiatkan kegiatan terkait KIE dan Pendampingan UMKM, agar pemahaman CPOB dan CPOTB menggugah kesadaran dari masyarakat pelaku usaha itu sendiri dalam menjamin kualitas produknya.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pengawasan Obat dan Makanan adalah kegiatan bersama semua lini terkait, BPOM (Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom), Lintas sektor (Pemda) dan Masyarakat (Pelaku Usaha) untuk jaminan yang lebih terpadu terkait keamanan dan mutu OM beredar.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan-1

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Monitoring Sampling dan pengujian sesuai perencanaan awal tahun, agar penyesuaian reagen, suku cdang dan bahan operasional pengujian dapat terkontrol	Pengadaan sample dan pengujian tiap bulan sesuai perencanaan yang disepakati	Koordinasi intensif petugas sampling san penguji laboratorium untuk kesesuaian target sample – Acak setiap bulan berjalan	Sampel masuk Lab. Setiap minggu ke-2 bulan berjalan, dan penyelesaian pengujian setiap minggu ke-4

IKU 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju

IKU Persentase Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{\textit{Jumlah Sampel Acak MS}}{\textit{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} x100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88,00	40,00	45,45	45,45	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur

pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat BPOM di Mamuju hingga TW I tahun 2023 adalah 45,45% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi yang ditetapkan yaitu 88,0%.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88,00	40,00	45,45	45,45	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Realisasi Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 yaitu 45,45% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi terhadap target tahun 2023 yaitu sebesar 88%. Capaian ini harus ditingkatkan hingga akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat hingga triwulan I tahun 2023 Tidak Efektif dengan kritera Tidak Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan karena ada sampel yang masuk di TW I namun belum dapat dilakukan pengujian karena dari 9 sampel yang masuk

hingga TW I baru sebanyak 5 sampel dilakukan pengujian dengan hasil 5 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan sebanyak 4 sampel belum selesai uji karena masih menunggu pengadaan alat laboratorium HVG di triwulan II Tahun 2023.

Capaian Koordinasi terpadu antara bidang pemeriksaan (Sampling) saat dilakukan perencanaan pengadaan sampel dan atau saat dilakukan sampling di sarana, cukup efektif dalam pengawasan produk MS (Penandaan dan pengujian lab.) meski tetap harus dibarengi dengan pendampingan dan edukasi terpadu

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Percepatan proses pengadaan alat laboratorium diharapkan dapat mendukung terhadap penyelesaian pengujian sampel makanan acak. Koordinasi terpadu antara bidang pemeriksaan (sampling produk) saat dilakukan perencanaan pengadaan sampel dan atau saat dilakukan sampling di sarana, cukup efektif dalam pengawasan produk MS (Penandaan dan pengujian laboratorium) meski tetap harus dibarengi dengan pendampingan dan edukasi terpadu.

Dalam lingkup area pengawasan BPOM di Mamuju, masih diwarna dengan ketidakberagaman produk Obat dan Makanan yang beredar, sehingga jumlah ataupun jenis produk yang dapat disampling sering berulang, yang mana hasil uji laboratoriumnya dapat diprediksi hasilnya (MS atau TMS).

e. Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Sehubungan PUK sampel Makanan cukup banyak dan beragam, yang mana sering membutuhkan pengujian dengan tingkat kesulitan Tinggi dan perlatan canggih yang belum semua balai memiliki, yang mana belum diketahui kemungkinan MS dan TMS nya, maka pencanangan

Regionalisasi Laboratorium bisa menjadi solusi tepat untuk mengirimkan sampel dengan PUK yang tidak dapat dilakukan di Balai POM di Mamuju

Tabel 3.5 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Percepatan proses pengadaan alat laboratorium untuk mempercepat penyelesaian pengujian sampel makanan acak	Pengujian Parameter Uji yang belum terkerja pada sampel makanan acak	Koordinasi dengan Tim Pengadaan terkait pelaksanaan pengadaan alat laboratorium HVG	Juni 2023

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\%\text{Obat MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Total\ Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji} x100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan -1 Tahun 2023

Tabel 3.6 CapaianIndikator Kinerja SasaranKegiatan Obat Aman Bermutu

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88,00	100,00	113,64	113,64	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Sampel Obat yang selesai Uji hingga Maret 2023 adalah : Komoditi Obat dan Nappza, Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Komoditi Kosmetik dengan capaian Total untuk semua komoditi adalah 113.64%. merupakan indikasi membaiknya kualitas produk Obat di wilayah provinsi Sulawesi Barat, sebagai jaminan keamanan dan kemanfaatan produk tersebut bagi masyarakat. Kriteria capaian 'Memenuhi Ekspektasi' dan simpulan 'Efektif'

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengujian sampel Obat dan Nappza tidak menemukan kendala karena merupakan sampel Regionalisasi yang telah disesuaikan kondisi peralatan dan ketersediaan Baku Banding dan Reagen, namun terjadi keterlambatan penyelesaian pengujian sampel OTSK dan Kosmetik dipengaruhi oleh reagen alat Karl Fisher (Uji Kadar Air) yang Indent dan beberapa reagen utama pengujian HPLC yang Habis pakai. Kendala lain terjadi pada TMK Penandaan Label, dimana masih ditemukan banyak TMK Penandaan pada komoditi Obat Tradisional dan Kosmetik, yang cukup memberikan kontribusi pada perhitungan akhir TMS.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Hal yang sangat perlu dilakukan untuk kelancaran pengujiaan kedepan adalah koordinasi terbuka antar bidang dan Penganggaran yang cukup, Revisi program, agar dapat dilakukan perencanaan yang tersusun dengan baik, termasuk perencanaan reagen, alat pendukung, operasional Laboratorium.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Pengujian produk Obat Tradisionak, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada TW 1., telah dilakukan percepatan dengan melibatkan

tenaga Honorer dan pengadaan langsung reagen dan alat tambahan yang dibutuhkan seperti alat SPE+Pump untuk pengujian Pengawet pada OTSK, dan Penguian Cemaran Logam Pada Kosmetik dan Obat Tradisional, telah dapat dilakukan dengan pembelian alat Microwave dan tambahan alat MVU-AAS untuk deteksi cemaran Merkuri

Tabel 3.7 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
Monitoring Sampling dan pengujian sesuai perencanaan awal tahun, agar penyesuaian reagen, suku cdang dan bahan operasional pengujian dapat terkontrol	Pengadaan sample dan pengujian tiap bulan sesuai perencanaan yang disepakati	Koordinasi intensif petugas sampling san penguji laboratorium untuk kesesuaian target sample – Targetted setiap bulan berjalan	Sampel masuk Lab. Setiap minggu ke-2 bulan berjalan, dan penyelesaian pengujian setiap minggu ke-4

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator kinerja“Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di lingkup Balai POM di Mamuju” dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{\textit{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\textit{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} x100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84,00	0,00	0,00	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan bila dibandingkan dengan target triwulan yaitu sebesar 84%, hal ini disebabkan karena tidak ada sampling dan pengujian sampel targeted pangan yang dilakukan di bulan Februari oleh BPOM di Mamuju. Untuk sampel pangan targeted di bulan Maret masuk ke laboratorium di akhir bulan maret sehingga pengujian sampel dilakukan di bulan berikutnya (TW 2).

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84,00	0,00	0,00	0,00	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 84%. dengan kriteria Tidak Dapat disimpulkan. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase Makanan Yang Bermutu berdasarkan pengawasan hingga triwulan I tahun 2023 dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sampel Targeted Pangan menurut Pedoman Sampling tahun 2023 terdiri dari 87 sampel dengan rincian yaitu sampel PJAS sebanyak 4, sampel DNA Babi 3, Tahu dan Mie basah 2, Pangan Fortifikasi 50, Sampel Pangan Tertentu 14. Sampai Triwulan I belum ada sampel targeted pangan non fortifikasi yang dilakukan pengujian karena sampel masuk di laboratorium di akhir bulan Maret sehingga pengujian akan dilakukan di bulan April (Triwulan II).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Koordinasi intensif antara Tim pemeriksaan dan Tim Pengujian terkait pelaksanaan sampling dan pemilihan sampel serta percepatan

pengujian diharapkan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Inovasi tiada henti dalam KIE dan pendampingan ke pelaku Usaha agar lebih banyak produk yang mendapat Izin Edar sebagai jaminan kualitas produk.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Pemenuhan produk Memenuhi Syarat dari segi Sampling, Penandaan Label dan Hasil Uji Laboratorium dapat terus meningkat, sehingga koordinasi untuk semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Percepatan pengujian sampel di Triwulan II juga perlu dilakukan untuk peningkatan pencapaian kinerja.

Table 3.11 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Percepatan proses pengadaan alat laboratorium HVG untuk mempercepat penyelesaian pengujian sampel makanan targeted	Pengujian Parameter Uji yang belum terkerja pada sampel makanan targeted	Koordinasi dengan Tim Pengadaan terkait penyelesaian pelaksanaan pengadaan alat laboratorium HVG	Juni 2023

IKU 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.

Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Indikator kinerja "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ \text{Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\textit{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\textit{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling

Produk Pangan Fortifikasi BPOM Mamuju TA 2023 sejumlah 50 Produk, terdiri dari 25 Produk Garam Beryodium, 15 Produk Minyak Goreng Sawit (MGS) dan 10 Produk Tepung Terigu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,00	100,00	111,11	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan hinggai TW I diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 10 sampel fortifikasi pangan yaitu 100% dengan hasil Capaian Kinerja TW I yaitu 111,11% bila diperbandingkan dengan target 3 bulan yaitu 90%, sehingga Kriteria Memenuhi Eksoektasi dan Kesimpulan Efektivitas Efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90,00	100,00	111,11	111,11	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan TW I tahun 2023 diperbandingkan dengan target tahunan Tahun 2023 90% dengan hasil 111,11% sehingga Kriterianya adalah Memenuhi Ekspektasi dan Kesimpulan Efektivitas Efektif.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengujian Pangan Fortifikasi Tepung terigu sebanyak 10 sampel yang dilakukan di Triwulan I dengan hasil Memenuhi Syarat (MS). Ketepatan pelaporan hasil uji produk Pangan Fortifikasi sangat terbantu dengan pelaksanaan Sampling yang sesuai Jadwal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaiankinerja

PUK DON pada pengujian Tepung Terigu yang membutuhkan peralatan tambahan khusus seperti nitrogen evaporator perlu menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengadaan di tahun anggaran 2024.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Untuk kesinambungan pemenuhan Capaian timeline Sampling dan Pengujian Pangan Fortifikasi secara baik dan tepat waktu, kerjasama antar Substansi Pemeriksaan dan Pengujian perlu menjadi komitmen bersama. Sejalan dengan ketersedian sarana peralatan, anggaran reagen, suku

cadang dan alat penunjang lainnya dari bagian Pengadaan internal dan Penyedia eksternal

Table 3.14 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Percepatan proses pengadaan alat laboratorium HVG untuk mempercepat penyelesaian pengujian sampel pangan fortifikasi	Pengujian Parameter Uji yang belum terkerja pada sampel pangan fortifikasi	Koordinasi dengan Tim Pengadaan terkait penyelesaian pelaksanaan pengadaan alat laboratorium HVG	Juni 2023

SASARAN KEGIATAN 2

"Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 2 (SK2) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria inklusi sampel studi adalah indIidu

rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2023

Tabel 3.15 Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu hingga triwulan) I tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Indeks Kesadaran masyarakat awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks

kesadaran. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah BPOM Mamuju pada tahun 2023 akan di peroleh pada Triwulan I Tahun 2023 dengan target minimal 75.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan triwulan tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan BPOM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Survey Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat baru diperoleh pada TW III Tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah : 1) pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang : petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal lain ditanyakan antara lain adalah : pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BPOM Mamuju dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BPOM di Mamuju tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BPOM Mamuju dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

BPOM Mamuju memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pada Triwulan I tahun 2023, BPOM Mamuju telah menyebarkan

infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BPOM Mamuju yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BPOM Mamuju. Infografis yang disebarluaskan oleh BPOM Mamuju diharapkan menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BPOM Mamuju.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selama Triwulan I tahun 2023 BPOM Mamuju tetap melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Melalui Car Free Day Mamuju yang diikuti oleh kurang lebih 380 orang. BPOM Mamuju juga melaksanakan kegiatan KIE bersama instansi atau lintas sektor, swasta dan Perguruan Tinggi : misalnya Dinas Kesehatan Mamuju, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Selama Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan 3 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan, Keamanan Pangan, Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Workshop strategi peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha dan materi materi lain yang dibutuhkan oleh lintas sektor.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tindak lanjut rekomenasi hasil evaluasi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu sebelumnya.

Table 3.16 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tindak Lanjut		
Selesai*	**Belum****	
	Rencana Aksi	***Timeline***
Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks sesuai perencanaan	Triwulan II

SASARAN KEGIATAN 3

"Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 3 (SK3) didasarkan pada penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut akan diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK3.

IKU 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/ seminar, workshop/ pelatihan/ bimbingan teknis, asistensi/ pendampingan/ *coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportitr, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan

4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Cara perhitungan indikator ini sebagai berikut.

- Dilakukannya survei yang dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *e-mail blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *e-mail blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%.
- Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.
- Kriteria yang digunakan adalah
  - 75,01 – 100 : sangat puas
  - 50,01 – 75 : puas
  - 25,01 – 50 : kurang puas
  - 0 – 25 : tidak puas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.1

Indikator Kinerja Utama		Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Kriteria (Triwulan)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan pelaku usaha sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi karena nilai akan keluar di akhir tahun 2023. Disamping itu Bimtek dan Desk kepada Pelaku Usaha/UMKM baru akan dimulai di TW 2 ini sesuai POA yang telah dibuat.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi Triwulan 1 dengan akhir tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Capaian Tahun (%)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93.4	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Belum terdapat realisasi indeks kepuasan pelaku usaha di Mamuju hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju, yaitu kedepannya akan ada pendampingan oleh fasilitator yang dibentuk oleh Balai POM di Mamuju yang memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta mekanisme Registrasi Produk di Badan POM, Kemudahan dan kesiapan petugas dalam membantu dan memberikan pendampingan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berperan dalam menunjang tercapainya target ini adalah nantinya akan ada pendamping dari Petugas BPOM Mamuju dibantu oleh Fasilitator UMKM yang direkrut untuk mendampingi pelaku usaha selama 4 bulan dalam proses sertifikasi dan registrasi produk.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Akan dilakukanakan pendampingan kepada pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya di Badan POM. Disamping itu adanya pendampingan fasilitator eksternal yang dilakukan nantinya turut serta dalam memberikan nilai positif terhadap tingkat kepuasan pelaku usaha

Table 3.19 Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
- Akan melakukan pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha pada Bimtek UMKM yang kan dilaksanakan di TW 2 ini	- Sosialisasi IKEPU dari pemateri Pusat terkait cara pengukuran IKEPU tahun 2023	- Akan melakukan pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha pada Bimtek UMKM yang kan dilaksanakan di TW 2 ini	- Mei 2023 – Juni 2023

IKU 8. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

Untuk mengukur indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2

Indikator Kinerja Utama		Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Kriteria (Triwulan)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan pelaku usaha sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi karena nilai akan keluar di akhir tahun 2023, akan tetapi rekomendasi tindak lanjut terhadap penilaian tahun sebelumnya sudah mulai dilaksankan seperti Publikasi (Liputan Media Massa) terhadap hasil Intensifikasi Hari Raya Ramadhan; Peningkatan penggunaan teknologi informasi (media sosial balai) untuk sosialisasi hasil pengawasan dan hasil kegiatan lainnya kepada masyarakat; Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang belum dipahami oleh masyarakat, misalnya tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.21 Perbandingan realisasi Triwulan 1 dengan akhir tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Capaian Tahun (%)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78.01	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Belum terdapat realisasi indeks kepuasan masyarakat di Mamuju hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan public relation dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- Intesifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
- Mendorong UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
- Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.
- Peningkatan penggunakan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk illegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak Kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial sehingga memberikan kesan BPOM konsisten melindungi masyarakat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini akan dilakukan oleh seluruh substansi Balai POM di Mamuju agar pelayanan maksimal diberikan kepada seluruh masyarakat di seluruh fungsi yaitu mulai dari pelayanan informasi dan edukasi, pengujian, sertifikasi, penindakan, pemeriksaan, pengawasan hingga supporting tim terkait saranan, prasarana dan administrasi lainnya. Seluruh pegawai telah diikut sertakan dalam peningkatan kompetensi di bidangnya secara berkala dengan tujuan dapat memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tabel 3.22 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
- Publikasi (Liputan Media Massa) terhadap hasil Intensifikasi Hari Raya Ramadhan; - Peningkatan penggunaan teknologi informasi (media sosial balai) untuk sosialisasi hasil pengawasan dan hasil kegiatan lainnya kepada masyarakat; - Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang belum dipahami	- Menganalisis bentuk rekomendasi dan bentuk intervensi yang akan dilakukan terhadap hasil penilaian indeks tahun sebelumnya dan menurunkan keanggota TIM untuk dilaksankan di tiap fungsi Balai POM di Mamuju	- Publikasi (Liputan Media Massa) terhadap hasil Intensifikasi Hari Raya Ramadhan; - Peningkatan penggunaan teknologi informasi (media sosial balai) untuk sosialisasi hasil pengawasan dan hasil kegiatan lainnya kepada masyarakat; - Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang belum dipahami	- April 2023 - April 2023-Juni 2023 - April 2023-Juni 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
oleh masyarakat, misalnya tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM.		oleh masyarakat, misalnya tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM.	

IKU 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan target dan realisasi hingga Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.23 Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BPOM di Mamuju terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP.

Pada Triwulan I tahun 2023, telah diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sebesar 95,99. Data ini diperoleh pada akhir triwulan I dan tidak berubah sampai akhir Triwulan I tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I tahun 2023 dengan triwulan sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I maka capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM adalah sama yaitu 95,99 dari target 91,00 atau dengan nilai capaian 105,48% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja hingga Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM TW 1 tahun 2023 berhasil mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

Hal ini sebagai akibat telah dibukanya konsultasi dan layanan informasi tatap muka secara langsung di ruangan ULPK BPOM Mamuju. Selain itu juga telah disediakan layanan konsultasi melalui nomor whatsapp khusus yang dapat diakses oleh para eksportir dan importir pengguna aplikasi e-bpom. Melalui nomor whatsapp ini para pelaku usaha dapat melakukan konsultasi denah secara langsung setelah mengajukan permohonan konsultasi. Selain itu, kepada pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam pengurusan izin edar terutama UMKM diberikan pendampingan baik yang dilaksanakan di ruang layanan ULPK BPOM Mamuju maupun yang diselenggaran di Mobil Layanan Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Keliling/ BIYANKA yang telah dipilih oleh petugas BPOM Mamuju berdasarkan berbagai kriteria. Upaya layanan khusus dan jemput bola ini diapresiasi khusus oleh lintas sektor dan para pelaku usaha.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 BPOM di Mamuju telah dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 0 orang
- SKI/SKE : 0 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 32 orang

Mulai triwulan I tahun 2023, layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BPOM Mamuju dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan secara paripurna. Selain itu juga telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasu SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi. Dengan adanya layanan tatap muka, mempengaruhi hasil survey kepuasan masyarakat menjadi meningkat. Selain itu, kepada pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam pengurusan izin edar terutama UMKM diberikan pendampingan baik yang dilaksanakan di ruang layanan ULPK BPOM Mamuju maupun yang diselenggaran melalui BIYANKA maupun di Dinas Penanaman Modal di Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh petugas BPOM Mamuju berdasarkan berbagai kriteria. Upaya layanan khusus dan jemput bola ini diapresiasi khusus oleh lintas sektor dan para pelaku usaha.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e sertifikasi, e registrasi, e bpom, e notifikasi atau Asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Dengan telah dibukanya layanan langsung kepada konsumen maka kepuasan konsumen terhadap layanan publik BPOM Mamuju meningkat. Apalagi dengan adanya layanan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha yang kesulitan menggunakan aplikasi yang saat ini sudah menjadi platform layanan publik di hampir semua instansi pemerintah.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 3.24 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebelumnya

Tindak Lanjut		
Selesai*	**Belum****	
	Rencana Aksi	***Timeline***
Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks sesuai perencanaan	Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks sesuai perencanaan	Triwulan II

SASARAN KEGIATAN 4

"Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 4 (SK4) didasarkan pada penilaian terhadap 6 (enam) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Pada Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Mamuju mencakup kegiatan pengawasan baik sarana distribusi maupun sarana produksi yang berada di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat. Untuk fasilitas sarana distribusi yang dilakukan pemeriksaan adalah fasilitas pelayanan kefarmasian maupun fasilitas penyaluran sediaan farmasi serta fasilitas distribusi produk makanan, sedangkan untuk sarana produksi yang menjadi target pengawasan adalah industri pangan MD serta industri pangan IRTP.

Untuk mencapai SK 4 maka disusun 7 indikator berikut.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK4.

IKU 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Sedangkan yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan adalah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat/ UPT atau lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Indikator kinerja "Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan =

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ dilaksanakan\ oleh\ UPT}{Total\ rekomendasi\ yang\ diterbitkan\ atau\ diterima\ oleh\ UPT} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju berdasarkan tabel diatas yaitu sebesar 100% dengan kategori Memenuhi ekspekstasi/Efektif.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	100,00	100,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi/efektif.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Memenuhi Ekspektasi/Efektif diperoleh sebagai hasil dari kedisiplinan petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan baik pemeriksaan sarana produksi maupun sarana distribusi dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan. Namun, masih terdapat beberapa rekomendasi yang ditindak lanjuti tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan karena terbatasnya jumlah personil/petugas.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian kinerja Memenuhi Ekspektasi/Efektif diperoleh sebagai hasil dari kedisiplinan petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan baik pemeriksaan sarana produksi maupun sarana distribusi dalam membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan

distribusi yang dilaksanakan maka tetap melanjutkan menjaga kepatuhan petugas dalam membuat surat rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.26 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
- Melaksanakan pendataan dan perekapan surat terkait hasil pengawasan - Mengingatkan kepada petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang masuk dalam daftar produk yang perlu dilakukan pengawasan melalui grup WA - Melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan/monitoring produk secara rutin	- Melaksanakan pendataan dan perekapan surat terkait hasil pengawasan - Mengingatkan kepada petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang masuk dalam daftar produk yang perlu dilakukan pengawasan melalui grup WA	- Melaporkan tindak lanjut hasil pengawasan/monitoring produk secara rutin	- tiap triwulan sampai Desember 2023

IKU 11. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Pemangku kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Indikator kinerja

"Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh *Stakeholder*" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* =

$$\left\{\frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada lintas sektor}}+\frac{\text{Jumlah tindak lanjut dari pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha}}\right\} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	88,89	113,96	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian di Triwulan I tahun 2023 adalah 113,96 % yang termasuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi/Efektif. Nilai ini dapat di capai dengan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, baik dari lintas sektor maupun pelaku usaha.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,00	88,89	113,96	113,96	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi presentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju bila dibandingkan dengan target tahunan dapat di capai dengan nilai 113,96 %. Upaya untuk menjaga supaya di target tercapai di akhir tahun terus dilakukan, khususnya dengan menjalin komunikasi baik di internal tim Balai POM di Mamuju mapun komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapat hasil yang baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Kerja sama dengan pemangku kepentingan yang sudah baik di tunjang dengan pro aktifnya pegawai Balai POM di Mamuju yang mendapat amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah faktor utama

tercapainya target di triwulan I ini, yang di harapkan ini akan berjalan secara konsisten hingga akhir tahun 2023.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Balai POM di Mamuju untuk menunjang kenaikan hasil inspeksi yang di tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, antara lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan edukasi akan pentingnya perbaikan yang harus di tindak lanjuti hasil inspeksi oleh pelaku usaha, melakukan pengawasan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan untuk mendorong pelaku usaha menindak lanjuti hasil inspeksi yang telah di berikan, serta melakukan evaluasi untuk tahun 2022 supaya di tahun 2023 terdapat peningkatan yang signifikan terkait hasil inspeksi yang di tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilaksanakan yaitu melakukan komitmen bersama dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan menjalin komunikasi secara intensif. Selain itu, juga dilakukan komunikasi kepada lintas sektor dan pelaku usaha terkait temuan ketidaksesuaian selama pengawasan serta lebih intens mengingatkan kepada lintas sektor dan pelaku usaha untuk melakukan perbaikan melalui komunikasi via Whatsapp serta melakukan pendampingan/bimbingan penyelesaian CAPA.

Tabel 3.28 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Triwulanan

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
- Membuat form CAPA dan dilakukan input oleh pemangku kepentingan dengan dibantu oleh petugas setelah dilakukan pemeriksaan - Melakukan intensifikasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengirimkan surat setiap akhir bulan	Telah dilakukan komunikasi yang intensif kepada pelaku usaha oleh petugas	akan terus melakukan komunikasi kepada pelaku usaha/lintas sektor terkait pentingnya tindak lanjut yang diberikan agar dalam menjalankan kegiatan dapat sesuai dengan ketentuan perundangan petugas membantu membuat CAPA setelah dilakukan pemeriksaan	Desember 2023

IKU 12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah keputusan sertifikasi yang dikeluarkan tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

a. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
b. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
c. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
d. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
e. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran poduk OT

f. Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE).

Indikator kinerja "Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

$$Persentase\ Keputusan\ Penyelesaian\ Sertifikasi\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}} X100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.3	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86,00	100,00	116,28	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian Triwulan I tahun 2023 adalah 116,28% yang termasuk dalan kategori memenuhi ekspektasi/efektif. Nilai ini dapat di capai karena tim sertifikasi yang sudah memahami mengenai prosedur teknis e sertifikasi dan evaluasi dokumen teknis sesuai yang di persyaratkan, serta adanya komitmen terkait pelayanan prima di tim sertifikasi Balai POM di Mamuju.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK 4.3	Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.00	86.00	-	-	100.00	116.28	116.28	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dibandingkan dengan target tahunan mencapai 116,28% dengan 100 % permohonan sertifikasi di tindak lanjuti secara tepat waktu. Upaya untuk mempertahankan capaian kinerja ini secara efektif terus dilakukan sampai akhir tahun demi terwujudnya pelayanan sertifikasi yang prima dari Balai POM di Mamuju terhadap pelaku usaha di wilayah kerjanya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun hal-hal yang menunjang keberhasilan capaian yaitu dengan adanya sistem baru terkait registrasi pelaku usaha melalui sistem OSS RBA yang semakin memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi pemenuhan aspek CPPOB. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksaannya yaitu keaktifan pelaku usaha masih kurang, sehingga diperlukan effort yang lebih kepada pelaku usaha, yang dibantu oleh fasilitator balai mauapun fasilitator eksternal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program-program yang telah dolakuklan oleh Balai POM di Mamuju sepanjang Triwulan I sudah dilaksanakan dengan optimal dan efisien, dibuktikan dengan realisasi presentas keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan secara tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju yang mencapai 100 %. Baik dari program

Bimbingan daring maupun melakukan kegiatan pra sertifikasi untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pelaku usaha mengenai proses e sertfikasi yang menjadi salah satu layanan Balai POM di Mamuju.

e. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Akan terus melakukan pendampingan ke pelaku usaha yang hendak mendaftarkan produknya ke BPOM, dengan tetap mengadakan perekrutan fasilitator eksternal untuk tahun berikutnya serta melakukan komunikasi secara intens kepada pelaku usaha yang masih dalam tahap proses registrasi.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi aspek CPPOB, CPKB dan lainya. Serta membangun komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) sebagai pihak yang memberikan rekomendasi penerbitan izin IRTP agara memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP.

Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
- membuat bimtek sertifikasi dengan menambahkan materi digital marketing sebagai upaya mendorong keberlanjutan usaha pelaku usaha/umkm - memberikan pendampingan secara intensif baik oleh petugas Balai POM di Mamuju maupun petugas fasilitator - memanfaatkan aplikasi zoom yang telah dimiliki oleh Balai untuk melakukan pendampingan secara daring	- melaksanakan bimtek sertifikasi - pendamingan UMKM	- Pendampingan melalui ZOOM yang dimiliki oleh Balai POM di Mamuju	Desember 2023

IKU 13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja "Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan, namun untuk sarana produksi yang berada di wilayah kerja BPOM di Mamuju hanya Industri Pangan dan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	66,67	95,24	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I 2023 sebesar 95.24 % yang termasuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif

b. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	66,67	95,24	95,24	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi/kurang efektif.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hasil pengawasan sarana produksi yang memenuhi ketentuan untuk TW 1 Tahun 2023 masih belum dapat memenuhi ekspektasi karena masih terdapat sarana yang ketika dilakukan pemeriksaan ternyata telah berhenti produksi dikarenakan masa berlaku izin edar produk telah berakhir, selain itu terdapat sarana produksi yang pemiliknya sakit sehingga sarana tidak berproduksi dalam jangka waktu lama (terdapat kerusakan pada beberapa bagian sarana produksi yang berpotensi terhadap keamanan produk). Dengan demikian penilaian dari sarana menjadi TMK. Selain itu, terdapat sarana yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena pemilik sarana tidak berada ditempat dan setelah dilakukan komunikasi, pemilik sarana tidak ingin untuk dilakukan pemeriksaan pada sarana miliknya.

Selain itu, jumlah industri pangan MD yang diawasi di wilayah Sulawesi Barat masih sangat sedikit dibandingkan dengan sarana IRTP yang sangat banyak, kemudian sejak berlakunya simplifikasi proses penerbitan Izin Penerapan CPPOB yang saat melakukan pendaftaran/registrasi

sepenuhnya hanya dinilai dari dokumen yang dikumpulkan dan aspeknya masih Memenuhi Ketentuan, namun setelah dilakukan pemeriksaan secara onsite/langsung ternyata sarananya masih belum Memenuhi Ketentuan.

Hambatan lainnya adalah kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi aspek CPPOB secara konsisten masih rendah, dimana saat melakukan proses pendaftaran pelaku usaha masih menjalankan aspek CPPOB namun setelah izin edar diberikan ternyata pelaku usaha sudah tidak memperhatikan dengan baik aspek CPPOB yang sebelumnya dijalankan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2023 jumlah sarana yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu sebanyak 9 sarana dengan rincian 8 sarana Industri Pangan MD (2 sarana TMK dan 6 Sarana MK) dan 1 sarana Industri Pangan Rumah Tangga (1 sarana TMK).

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi aspek CPPOB serta membangun komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) sebagai pihak yang memberikan rekomendasi penerbitan izin IRTP agara memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP.

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.32 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
- Melaksanakan pengawasan sarana produksi secara intens kepada pelaku usaha serta pendampingan untuk selalu memenuhi aspek CPPOB - Melakukan koordinasi kepada Fungsi Infokom di Unit kerja untuk melaksanakan KIE kepada pelaku usaha - Melakukan brainstorming kepada petugas yang melaksanakan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan sarana perlu memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keamanan dan mutu produk secara langsung - Melaksanakan komunikasi kepada dinas terkait (dinas kesehatan serta dinas perindustrian dan perdagangan) terkai bantuan atau pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi secara rutin serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi aspek CPPOB - Melakukan penyamaan persepsi kepada petugas pengawas yang masih belum memahami dengan baik aspek-aspek pemeriksaan yang berhubungan dengan keamanan dan mutu produk secara langsung - Melaksanakan komunikasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kesulitan yang dialami pelaku usaha.	- Melakukan pemeriksaan sarana produksi secara rutin dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha - Melakukan koordinasi dengan fungsi infokom untuk dapat mengagendakan KIE bersama pelaku usaha	- Tiap triwulan sampai Desember 2023 - Desember 2023

IKU 14. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja "Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

$$Persentase\ Sarana\ Distribusi\ Obat\ yang\ MK$$

$$= \frac{Jumlah\ Sarana\ Distribusi\ Obat\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distibusi\ yang\ diperiksa}\ X100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.BPW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.5

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	85,42	122,02	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan TW I tahun 2023 sebesar 122,02% termasuk dalam kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70,00	85,42	122,02	122,02	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan I tahun 2023 masih tidak dapat disimpulkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang menyebabkan capaian diatas adalah sarana distribusi yang dilakukan pemeriksaan hingga TW 1 tahun 2023 adalah mayoritas masih sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, dimana hasil akhir penetuan MK atau TMK berdasarkan penilaian skor sesuai dengan form pemeriksaan dan skor ini menentukan penilaian dari sarana apakah masuk dalam kategori A atau B (termasuk dalam kategori MK) ataua kategori C atau D (termasuk dalam kategori TMK). Selain itu, sebagian besar sarana yang dilakukan pemeriksaan telah memenuhi aspek persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. namun, terdapat pula hambatan terkait pengawasan sarana yang masih belum mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara merata/meluas diakibatkan masih adanya wilayah

yang sulit untuk diakses sehingga masih terdapat sarana yang belum dilakukan pengawasan/belum memahami persyaratan terkait pemenuhan aspek pengelolaan sesuai dengan ketentuan. selain itu sejak bulan Februari tahun 2022 terjadi pembaharuan terhadap form pemeriksaan sarana distribusi Pangan yang sebelumnya hanya terdiri dari 33 aspek menjadi 96 aspek yang memerlukan pemahaman dan analisis yang lebih dalam oleh petugas yang melaksanakan pemeriksaan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lama.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 16 sarana dengan hasil 15 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian tersebut terdiri atas pemeriksaan PBF sebanyak 2 sarana (2 sarana Mk dan 0 sarana TMK), pemeriksaan sarana apotek sebanyak 6 sarana (6 sarana MK dan 0 sarana TMK), pemeriksaan sarana GFK sebanyak 2 sarana (1 sarana MK dan 1 sarana TMK), pemeriksaan sarana Rumah Sakit sebanyak 3 sarana (3 sarana MK dan 0 sarana TMK), dan pemeriksaan sarana klinik sebanyak 3 sarana (3 sarana MK dan 0 sarana TMK).

Selain itu, sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023 juga dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, distribusi suplemen kesehatan, distribusi kosmetik, dan distribusi pangan sebanyak 32 sarana dengan hasil 26 sarana Memenuhi Ketentuan dan 6 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional sebanayk 2 sarana (2 sarana MK dan 0 sarana TMK), pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 2 sarana (2 sarana MK dan 0 sarana TMK), pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 9 sarana

(9 sarana MK dan 0 sarana TMK), dan pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 19 sarana (13 sarana MK dan 6 sarana TMK).

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.34 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
- Melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan analisis resiko - Melaksanakan diseminasi secara internal oleh petugas yang telah mengikuti pelatihan, sehingga semua petugas yang melaksanakan pemeriksaan sarana dapat mengetahui update peraturan dan juga petunjuk teknis pengawasan sehingga meminimalkan permasalahan dilapangan. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian realisasi pengawasan.	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sesuai dengan analisa risiko - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait realisasi pengawasan	- Melaksanakan diseminasi oleh petugas yang pernah mengikuti pelatihan kepada rekan-rekan petugas yang belum mengikuti pelatihan sehingga petugas yang lain terpapar terkait peraturan serta petunjuk teknis pemeriksaan sehingga kesalahan penentuan kategori ketidaksesuaian dapat diminimalisir, serta mengarahkan rekan-rekan petugas untuk mengikuti pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS untuk mengembangkan kompetensi secara mandiri - Melaksanakan pengawasan di wilayah terluar Provinsi Sulawesi Barat agar pemerataan pengawasan dapat dilakukan, sehingga semua sarana yang menjadi target pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan	- Tiap triwulan hingga Desember 2023 - Desember tahun 2023

IKU 15. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

a. Perbandingan target dan realisasi hingga Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.35 Realisasi Indeks Pelayanan Publik hingga Triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Triwulan I tahun 2023 belum diperoleh Indeks Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Tim Penilai UPP

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I tahun 2023 dengan tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-

Nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 hanya diperoleh sekali setahun sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahunannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Belajar nilai IPP tahun 2022, BPOM Mamuju melakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha, akademisi, komunitas masyarakat lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta media. Pada Bulan Maret Tahun 2023 telah dilakukan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan

semua komponen masyarakat tersebut untuk mendapatkan masukan terhadap draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sedang disusun dan merupakan penyempurnaan dari SPP sebelumnya.

- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BPOM Mamuju mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik di BPOM Mamuju. Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind,* semua harus mendapat layanan yang sama.

- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM Mamuju untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BPOM Mamuju untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BPOM Mamuju, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BPOM Mamuju misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BPOM Mamuju ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastian kepada pelanggan. . Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 3.36 Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan capaian Indeks Pelayanan Publik

Keterangan	Janua	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan	Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tata cara dan

Keterangan	Janua	Februari	Maret
Rekomendasi/Perbaikan	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata	Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan tata cara
Rencana Aksi	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara	Masih banyak pelaku usaha yang belum paham tata cara
Kondisi Setelah Rencana	Semakin banyak yang	Semakin banyak yang	Semakin banyak yang
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

IKU 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT

- UMKM OT yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT
- UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1)Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2)Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3)Hal lain yang dirasa dapat membantu menigkatnya UMKM Kosmetik.

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

% UMKM yang memenuhi standar =
Jumlah UMKM yang memenuhi standar/ Jumlah UMKM yang diintervensi/didampingi pada tahun berjalan

Berikut ini Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT TA 2023.

Tabel 3.37 Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT TA 2023

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1	1
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April		
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober		
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-November		
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan		
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	0	0
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret		
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November		
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November		
Total Progres							
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei		
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September		
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November		
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember		
Total Progres							
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						11	11

Sumber : Monev RAPK Tahun 2023, 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan 1 Tahun 2023

Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.7

Indikator Kinerja Utama		Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Kriteria (Triwulan)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10.00	10.00	100.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sampai triwulan 1 sebesar 100.00 dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi/Efektif. Di Triwulan ke 2 nanti akan dilakukan pengadaan fasilitator eksternal untuk menambah fasilitator pendamping dan juga kan dilakukan bimtek dan desk terhadap pelaku usaha UMKM.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan 1 dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.39 Perbandingan realisasi Triwulan 1 dengan akhir tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi	Capaian Triwulan 1 (%)	Capaian Tahun (%)	Kesimpulan Efektivitas
IKSK4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55.56	10.00	10.00	100.00	18.00	EFEKTIF

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik sudah mencapai progres 18.00. Upaya terhadap progres peningkatan terus diperhatikan agar target yang direalisasikan tahun ini bisa tercapai di akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kesiapan dan keseriusan pelaku usaha dalam menyiapkan sarana dan prasarana produksi serta medan yang menyebabkan seringnya kendala jaringan komunikasi. Adanya fasilitator eksternal yang disediakan nantinya akan dimaksimalkan untuk bisa membantu dalam menyiapkan dokumen administrasi pelaku usaha.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dalam kegiatan pendampingan UMKM adalah kesiapan dan keseriusan pelaku usaha dalam menyiapkan sarana dan prasarana produksi serta medan yang menyebabkan seringnya kendala jaringan komunikasi.

Faktor penunjang berupa adanya fasilitator eksternal yang bisa membantu dalam menyiapkan dokumen administrasi pelaku usaha.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Akan tetap melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang masih dalam tahap proses sertifikasi hingga tahap registrasi produk sampai memperoleh NIE produk, serta program perekrutan fasilitator eksternal pada tahun akan dilakunakan di TW 2 ini.

Tabel 3.40 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
- Seleksi fasilitator eksternal - Bimtek fasilitator eksternal -Bimtek UMKM oleh fasilitator - Pendampingan UMKM	- Penetapan UMKM yang akan didampingi di tahun 2023 - Pembukaan pendaftaran fasilitator eksternal	- Seleksi fasilitator eksternal - Bimtek fasilitator eksternal -Bimtek UMKM oleh fasilitator - Pendampingan UMKM	- Mei 2023 - Mei 2023 - Mei 2023 – Juni 2023 - Mei 2023 – Juni 2023

SASARAN KEGIATAN 5

"Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 5 (SK5) didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut diuraikan analisa capaian dari setiap Indikator Kinerja SK5.

IKU 17. Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b)KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Capaian indikator ini berasal dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP BPOM RI.

Indikator kinerja "Tingkat KIE Obat dan Makanan Yang Efektif di Masing Masing Wilayah Kerja Balai POM di Mamuju" dihitung berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif =

$$\frac{Jumlah\ responden\ yang\ meningkat\ pemahamannya}{Total\ responden}\ x\ 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan I tahun 2023

Tabel 3.41 Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,01	93,16	100,16	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta

dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BPOM di Mamuju memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BPOM di Mamuju melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan I tahun 2023 dengan jumlah responden mencapai 36 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BPOM di Mamuju dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BPOM Mamuju pada triwulan I tahun 2023 adalah 93,16 (rata rata dari bulan Januari sampai Maret) dari target 93,1 atau dengan capaian 100,06% yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,01	93,16	100,16	100,16	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target akhir tahun 2023 dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil survey pada triwulan I tahun 2023 , harus menjadi kajian dan masukan bagi BPOM di Mamuju untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 yang telah mencapai target yang ditetapkan, BPOM Mamuju harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih *friendly* dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor

pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BPOM Mamuju dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Media sosial tetap menjadi pilihan namun tidak mengenyampingkan media yang lain. Dengan demikian hasil penilaian efektifitas KIE tetap dapat dipertahankan di masa masa mendatang.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 BPOM di Mamuju belum dilaksanakan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI Tetapi dilaksanakannya KIE bersama instansi atau lintas sektor, swasta dan Perguruan Tinggi antara lain Dinas Kesehatan

Selama Triwulan I tahun 2023 telah dilakukan 3 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan, Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Workshop penguatan komitmen lintas sektor.

Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BPOM Mamuju untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BPOM Mamuju harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat. Salah satu contoh pelaksanaan KIE dengan mempertimbangkan target audien dan media adalah kampanye Keamanan Pangan. Secara umum, Ibu adalah anggota keluarga yang paling peduli dengan penyediaan pangan yang aman dan bergizi bagi keluarga. Demikian juga saat memilih obat untuk keluarga yang sakit. Karena itu, BPOM Mamuju selalu melibatkan komunitas perempuan dan ibu ibu sebagai target audien KIE.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun ekternal)

Tabel 3.43 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/Permasalahan	Kegiatan KIE bersama Tomas belum dapat dilaksanakan meskipun Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan penyebaran informasi melalui pameran	Kegiatan KIE bersama Tomas belum dapat dilaksanakan meskipun Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan penyebaran informasi melalui pameran	Kegiatan KIE bersama Tomas belum dapat dilaksanakan meskipun Selain itu juga dilaksanakan KIE bersama lintas sektor dan penyebaran informasi melalui pameran
Rekomendasi/Perbaikan	Dilaksanakan KIE bersama Lintas Sektor dengan mengundang komunitas komunitas.	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor.	Pelaksanaan KIE bersama Lintas Sektor
Rencana Aksi	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Akan dilaksanakan KIE bersama OPD (Lintas Sektor).	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media sosial
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	KIE Tomas belum terlaksana	KIE Tomas belum terlaksana.	KIE yang belum terlaksana akan dilaksanakan di daerah lain.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE dapat terlaksana bersama beberapa OPD/Lintas Sektor	KIE telah dilaksanakan sesuai perencanaan dengan perluasan titik KIE.
Status	Open	Open	Close
Timeline	1 bulan	1 bulan	1 bulan

IKU 18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan PJAS Aman adalah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap kader cilik keamanan pangan dari kelompok siswa dan fasilitator keamanan pangan dari kelompok guru. Selain itu akan dilakukan pengawalan/pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut aman melalui program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria sekolah dengan PJAS Aman yaitu memiliki kader keamanan pangan sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS berasal dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan sasaran jumlah sekolah sebanyak 14 sekolah masing – masing 6 (enam) sekolah di Kabupaten Mamuju dan 8 (delapan) sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah.

Evaluasi program sekolah dengan PJAS Aman berdasarkan progress tahapan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret – April (TW 1 – TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April – Juni (TW 2 – TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April – November (TW 2 – TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli – September (TW 3 – TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus – November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober – Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Capaian Indikator kinerja “Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman” dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS). Berikut ini gambar yang menunjukkan capaian indikator kinerja tahun 2023.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20.00	20.00	100.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Capaian Indikator kinerja "Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman" dihitung berdasarkan progress tahapan yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2023, progress capaian realisasi sekolah yang diintervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sudah mencapai target realisasi yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	68.00	20.00	-	-	20.00	100.00	20.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi progress tahapan jumlah sekolah dengan PJAS Aman Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan yaitu 20% melalui pelaksanaan kegiatan Advokasi Lintas Sektor sehingga sudah sesuai target realisasi progress tahun 2023 dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi"

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll untuk menentukan lokus sekolah yang akan diintervensi.

Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Daerah setempat yang menjadi lokus intervensi serta pihak sekolah terkait yang ditunjuk oleh Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan telah membentuk komitmen melalui penandatanganan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah setempat dalam mendukung keberhasilan program sekolah dengan PJAS Aman yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Diharapkan ke depannya, kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah dalam mendukung program ini semakin baik sehingga dapat berkomitmen untuk mereplikasikan program intervensi PJAS Aman ini dan memasukkan dalam program prioritas pemerintah daerah.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sekolah dengan PJAS Aman yang telah diintervensi pada tahun 2022 berhasil masuk sebagai nominator dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tingkat Nasional dengan masing – masing perwakilan dari tingkat SD, SMP dan SMA. Sekolah yang berhasil menjadi nominator ini diharapkan dapat menjadi percontohan / *role model* dan juga motivasi untuk sekolah yang akan diintervensi pada tahun 2023 untuk pemenuhan komitmen dalam pelaksanaan keamanan pangan di sekolah khususnya dengan memiliki kader keamanan pangan aktif di sekolah dan program mandiri sekolah terkait keamanan pangan serta inovasi – inovasi kemanan pangan yang menunjang keberhasilan sekolah dengan PJAS Aman dari hili ke hulur.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Dilakukan pendampingan secara intnesif terhadap Sekolah yang diintervensi agar dapat membentuk komitmen Kader Keamanan Pangan sekolah untuk memwujudkan keamanan pangan di sekolah serta melakukan replikasi program di Tahun Selanjutnya secara mandiri menggunakan anggaran masing-masing Sekolah dalam mengawal penerapan keamanan PJAS secara berkelanjutan.

Tabel 3.44 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
Komitmen Kader keamanan pangan sekolah untuk lebih tertarik dengan PJAS Aman	- Koordinasi dengan pihak sekolah untuk penunjukan Kader Keamanan Pangan Sekolah	- Koordinasi dengan pihak sekolah untuk penunjukan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang aktif yang dapat menjadi spoke person di sekolah untuk menyebarkan informasi keamanan pangan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan - Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Sekolah bagi kader keamanan pangan yang telah ditunjuk	April – Mei 2023 Mei – Juni 2023

IKU 19. Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator kinerja ketiga dalam pencapaian Sasaran Kegiatan keenam adalah “Jumlah desa pangan aman” dengan target sebanyak 1 desa. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah

Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki kriteria berikut.

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Adapun tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman sebagai berikut.

Tabel 3.45 Tahapan dan bobot Indikator Desa Pangan Aman

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20.00	Januari-April
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5.00	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15.00	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15.00	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10.00	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00	· Pre: Mei-Oktober - Post November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10.00	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Desember
9	Pengawalan	10.00	Juni-Desember

Sumber : Monev Capaian RAPK Diolah Penyusun, 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20,00	20,00	100,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Jumlah desa yang menjadi target intervensi Tahun 2023 yaitu 7 desa dan target pengawalan desa TYL yaitu 18 desa. Triwulan I Tahun 2023 telah diselesaikan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Capaian jumlah Desa Pangan Aman di Triwulan I Tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20,00	20,00	100,00	20,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi progress tahapan jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan yaitu 20% melalui pelaksanaan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa sehingga sudah sesuai target realisasi progress tahun 2023 dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah Sulawesi Barat. Tahapan

yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll untuk menentukan lokus desa yang akan diintervensi.

Kunci keberhasilan program intervensi desa pangan aman ini yang terpenting adalah komitmen seluruh unsur baik Pemerintah daerah mulai dari Pemerintah Desa hingga Pemerintah Kabupaten / Kota dan masyarakat desa itu sendiri yang komitmen dalam mewujudkan keamanan pangan di desa. Perubahan perilaku tidak semudah membalikkan telapak tangan, diperlukan waktu yang tidak singkat sebagai upaya agar masyarakat secara kontinyu terpapar informasi keamanan pangan. Sehingga peran kader keamanan pangan desa aktif dan tim keamanan pangan desa sebagai *spokeperson* dan perpanjangan tangan program desa pangan aman sangat menentukan terjadinya perubahan perilaku dalam menerapkan praktik keamanan pangan dalam kehidupan sehari – hari.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program desa pangan aman ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Komunitas yang diintervensi adalah komunitas keluarga baik ibu rumah tangga, ibu hamil / menyusui, ibu memiliki balita, ibu PKK, komunitas sekolah baik guru, siswa maupun pengelola kantin sekolah, remaja putra/putri, karang taruna, kader pembangunan masyarakat, warung / ritel, pedagang kreatif lapangan (PKL) dan pelaku usaha IRTP yang mencakup perwakilan semua komunitas yang ada di desa. Seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan desa pangan aman.

Pada Tahun 2022, Desa Pangan Aman yang diintervensi di Kabupaten Pasangkayu yakni Desa Polewali berhasil masuk sebagai nominator dalam Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional sebagai perwakilan dari Regional Timur. Desa panga naman ini diharapkan dapat menjadi percontohan dan motivasi bagi desa lain untuk memenuhi komitmen dalam penerapan praktik keamanan pangan di desa serta program mandiri dan inovasi – inovasi yang menunjang keberhasil keamanan pangan di desa.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Dilakukan pendampingan secara intensif Desa yang telah diintervensi agar dapat membentuk komitmen Desa untuk menerapkan praktik keamanan pangan di desa dan melakukan replikasi program di Tahun Selanjutnya secara mandiri menggunakan anggaran masing - masing Desa.

Tabel 3.47 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
komitmen tim KPD dalam mendukung program GKPD di masing – masing desa	- Koordinasi Bersama Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa - Monitoring dan pendampingan secara intensif pengawalan desa yang diintervensi	- Program ini merupakan program yang ditagging terkait Renja Penurunan Stunting sehingga pada implementasi program diharapkan dapat berfokus untuk mendukung terjadinya penurunan angka stunting di desa - Koordinasi Bersama Kepala Desa dan tim keamanan pangan desa yang	April – Juni 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
		ditingkatkan secara massif karena tim keamanan pangan desa yang bertugas untuk dapat menggerakkan dan memotivasi para kader keamanan pangan desa	

IKU 20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas

a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
c. Pasar pangan aman berbasis kominitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat.
g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar Aman Dihitung dari jumlah pasar yang:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas
- Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.
- Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Adapun tahapan dan bobot Indikator sebagai berikut.

Tabel 3.48 Tahapan dan bobot Indikator Pasar Aman Berbasis Komunitas

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan
1	Advokasi	20.00	Januari-April
2	Survei Pasar	5.00	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15.00	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15.00	April-Mei
5	Penyuluhan	10.00	Juni-Juli
6	Kampanye	10.00	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15.00	September- Oktober
8	Pengawalan	10.00	Februari-Oktober
	Total	**100.00**	

Sumber : DO IKU Balai POM di Mamuju, 2023

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.49 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.4

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	25.00	25.00	100.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Capaian jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di Triwulan I Tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi			Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
IKSK5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4.00	25.00	-	-	25.00	100.00	25.00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi progress tahapan jumlah Pasar Aman Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan yaitu 25% melalui pelaksanaan kegiatan Advokasi Lintas Sektor dan Survei Pasar sehingga sudah sesuai target realisasi progress tahun 2023 dengan kriteria "Memenuhi Ekspektasi"

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll untuk menentukan lokus pasar yang akan diintervensi. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Balai POM di Mamuju dengan Pemerintah Daerah setempat yang menjadi lokus intervensi yang ditunjuk oleh Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan telah membentuk komitmen melalui

penandatanganan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah setempat dalam mendukung keberhasilan program pasar aman yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal.

Pada tahun 2022, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas yang diitnervensi tahun sebelumnya berhasil menjadi nominator Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komuitas diharapkan dapat menjadi percontohan / *role model* dan juga motivasi untuk pasar yang akan diintervensi pada tahun 2023 untuk pemenuhan komitmen dalam pelaksanaan keamanan pangan sebagaimana pasar merupakan rantai distribusi pangan awal yang menyalurkan pangan – pangan ke masyarakat. Melalui pengawasan pasar pangan aman berbasis komunitas dengan memberdayakan petugas pasar dapat menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bebas dari bahan berbahaya yang ada di pasar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Tabel 3.50 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Pendampingan secara intensif terhadap pelaksanaan program pasar aman	Pengiriman materi secara personal ke masing-masing petugas pasar yang diintervensi	Koordinasi Bersama Kepala Pasar, petugas pasar dan pengelola pasar terkait pelaksanaan pasar pangan aman berbasis komunitas serta penunjukan petugas pasar yang di SK kan - Pelaksanaan bimtek petugas pasar untuk menghasilkan petugas pasar yang dapat melakukan pengawasan pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya di pasar	April - Mei 2023

SASARAN KEGIATAN 6

"Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju yang optimal".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 6 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Berikut dijelaskan analisas setiap indikatornya.

IKU 21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{Jumlah\ sampel\ Obat\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ sampel\ Obat} \text{ X } 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ sampel\ Obat\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ sampel\ Obat} \text{ X } 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling tahun 2023. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.51 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	18,63	15,26	81,91	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Target Sampling dan pengujian sampel Obat (obat, OTSK, obat kuasi dan Kosmetik) yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I sesuai target perencanaan adalah 81 sampel, namun realisasi sampling adalah 85 sampel atau 107%. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan sample regionalisasi untuk komoditi OTSK klaim 'batuk' untuk disampling lebih awal terkait ketersediaan reagen dan kesiapan instrument peralatan. Capaian simpulan 'kurang efektif' yang belum memenuhi ekspektasi TW-1 sebesar 81,91% juga disebabkan karena keterlambatan pengujian sampel Kosmetik yang harus menunggu pengadaan reagen yang indent dan bahan pendukung alat instrument yang habis pakai

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Jenis zat aktif sampel obat regionalisasi yang disampling oleh penyampling dari balai lain sering tidak terprediksi sehingga mempengaruhi kebutuhan reagensia. Namun dengan adanya regionalisasi obat yang dilaksanakan secara *'keseluruhan PUK per klas terapi'* relatif memudahkan dalam penyelesaian, karena pengadaan reagen dapat direncanakan lebih awal
- Alat laboratorium AAS sudah dilengkapi Microwave dan alat dukung MVU untuk pengujian cemaran logam Merkuri (Hg) Kosmetik dan OTSK, namun sering yang menjadi kendala adalah 'Gas Pembawa-Argon' yang cepat habis oleh pemakaian rutin, sehingga sangan dibutuhkan adanya ketersediaan/Stock untuk suku cadang gas-gas alat AAS yang dibutuhkan

c. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Penjadwalan pemakaian alat Laboratorium terkait Microwave dan AAS
- Peminjaman reagen ke UPT terdekat jika reagen yang di butuhkan pengadaannya indent

d. Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Pernjadwalan penggunaan alat microwave dan AAS untuk menghindari over loading terhadap kedua alat tersebut sebagai upaya menghindari keterlambatan pelaporan hasil uji sampel dengan Parameter Uji Logam berat.
- Koordinasi dengan UPT lain yang jaraknya dekat dengan Balai POM di Mamuju dalam hal peminjaman reagen untuk pemenuhan target penyelesaian pengujian parameter logam.
- Memonitor pengadaan reagensia untuk pengujian sampel, dalam rangka mengakomidir kebutuhan reagensia selama setahun jika terdapat perubahan jenis sampel atau perubahan target sampling dari perencanaan awal

Tabel 3.52 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Monitoring ketersedian Reagen, Baku Banding, Suku Cadang, Operasional pengujian dan alat penunjang yang dibutuhkan untuk kelancaran aktifitas pengujian sampel	Evaluasi capaian dan kendala pengujian tiap TW	Koordinasi intensif petugas BMN, dan Tim pengujian ketersedian semua kebutuhan pelaksanana uji sampel di laboratorium	Desember 2023

IKU 22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di lingkup Balai POM di Mamuju

Indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standardihitungdenganrumusberikut.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{Jumlah\ sampel\ Makanan\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ sampel\ Makanan} \text{ X } 100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ sampel\ MAkanan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ \ sampel\ Makanan} \text{ X } 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka

pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan 257 Bab 4 – Penutup pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). BPOM di Mamuju termasuk laboratorium regional dengan koordinator BBPOM di Makassar.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.53 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	17,73	10,29	58,06	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Realisasi Triwulan I untuk pengujian Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 10,29% bila dibandingkan dengan Target Triwulan I sebesar 17,73% sehingga Capaian Kinerja Triwulan sebesar 58.06% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan Kesimpulan Efektifitas yaitu Tidak Efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	17,73	10,29	58,06	10,29	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Capaian Realisasi Triwulan I untuk pengujian Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 10,29% bila dibandingkan dengan Target Tahun 2023 sebesar 100% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan Kesimpulan Efektifitas yaitu Tidak

Efektif. Diharapkan pada triwulan berikutnya dapat memenuhi target sehingga target kumulatif dalam setahun dapat tercapai yaitu 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Capaian presentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan I tahun 2023 Tidak memenuhi Ekspektasi / Tidak Efektif, hal ini disebabkan oleh masih adanya pengujian yang belum dapat dilakukan karena hingga saat laporan ini dibuat masih menunggu datangnya alat laboratorium HVG untuk pengujian dengan Parameter Uji Cemaran logam merkuri (Hg) dan Arsen (As) pada produk makanan

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
   - Pengadaan alat HVG di awal tahun 2023 beserta reagensia yang dibutuhkan untuk pengujian logam Hg dan As diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pengujian
   - Koordinasi denga BBPOM di Makassar sebagai balai koordinator Region Makassar untuk perameter uji yang belum dapat dilakukan oleh BPOM di Mamuju, misalnya PK Glikosida Steviol , PK Cemaran logam pada Produk AMDK yang pengujiannnya menggunakan ICP-MS, Kadar CO2 Bebas dan paramneter uji Kekeruhan pada AMDK.
   - Perencanaan pengadaan alat berdasarkan skala prioritas yang dapat menunjang pemenuhan SKL dan menunjang terlaksananya pengujian terhadap Parameter Uji Wajib.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya
Tabel 3.54 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut

	Selesai	Belum	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Percepatan proses penyelesaian pengadaan alat laboratorium HVG untuk mempercepat penyelesaian pengujian sampel pangan acak dan sampel pangan fortifikasi	Pengujian Parameter Uji yang belum terkerja pada sampel pangan acak dan sampel pangan fortifikasi	Koordinasi dengan Tim Pengadaan terkait penyelesaian pelaksanaan pengadaan alat laboratorium HVG	Juni 2023

SASARAN KEGIATAN 7

"Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Mamuju".

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 7 (SK7) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun n-1.Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 triwulan I tahun 2023 sebagai berikut.

IKU 23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

Penindakan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over* tahun n-1.Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20.00	55.00	275.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

Hingga periode triwulan I, Capaian dari Indikator kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah 55.00 %, dengan target TW I adalah 20.00%, maka hasil perhitungan capaian TW I yaitu 275% dengan kriteria Capaian adalah Tidak Dapat Disimpulkan. Adapun total target perkara BPOM di Mamuju pada tahun 2023 adalah 2 perkara, dan realisasi perkara yang telah ditangani hingga periode TW I tahun 2023 adalah 4 perkara; Seluruh perkara yang ditangani terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Mamuju yaitu 3 Perkara terjadi di Kab. Mamuju dan 1 Perkara terjadi di Kab. Mamuju Tengah.

Dalam periode triwulan I, terdapat 4 SPDP yang telah dikirimkan ke kejaksaan, dan 4 Perkara tersebut telah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan (tahap 1) dan 3 (tiga) perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), sementara 1 (Satu) Perkara telah menerima Surat petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19). Pada bulan Maret tahun 2023, terdapat 3 perkara yang telah memperoleh surat P-21 dari Kejaksaan, dan akan direncanakan untuk proses Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam periode triwulan I, terdapat 4 SPDP yang telah dikirimkan ke kejaksaan, dan 4 Perkara tersebut telah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan (tahap 1) dan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), sementara 1 (Satu) Perkara telah menerima Surat petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19). Pada bulan Maret tahun 2023, dan terdapat 3 perkara yang telah memperoleh surat P-21 dari Kejaksaan, dan akan direncanakan untuk proses Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.;

Target awal tahun adalah 2 (dua) perkara, akan tetapi karena pelaksanaan kegiatan penindakan dilaksanakan didalam kota Mamuju, sehingga sisa anggaran yang digunakan masih bisa di optimalkan untuk menangani perkara tambahan.

Hal yang menyebabkan tingginya jumlah perkara yang telah ditangani oleh BPOM di Mamuju pada periode TW I adalah informasi tentang adanya tindak pidana dari pihak internal maupun masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Penyidik BPOM di Mamuju sehingga menjadi capaian perkara. Adapun informasi yang

diberikan oleh masyarakat sangat mendukung dalam proses penindakan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

Perlu diperhatikan adalah masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani perkara. Balai POM di Mamuju hingga triwulan I hanya memiliki 2 (Dua) PPNS aktif yang berada dalam kelompok kerja penindakan. Oleh karena itu saat ini sedang diusulkan untuk mempercepat proses pelantikan dan menambah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan PPNS dari BPOM di Mamuju. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Kuantitas dan kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan;
- Kuantitas personil yang melakukan penyidikan masih sangat kurang, sehingga kegiatan penyidikan berupa investigasi awal, operasi penindakan dan pemberkasan perkara dilakukan oleh petugas yang sama;
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen;
- Koordinasi yang lebih intens dengan unsur Criminal Justice System di daerah;

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah seringnya dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka meningkatkan keberhasilan kegiatan penindakan, diantaranya dengan Kepolisian, Kejaksaan, BNN, Laboratorium forensic Polri dan stakeholder lainnya. Selain itu dengan adanya kegiatan Intelijen dan adanya informasi-informasi baik dari stakeholder terkait termasuk masyarakat sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, telah dilantiknya satu orang PPNS pada staf kelompok substansi penindakan sehingga dapat membantu mempercepat penyelesaian berkas perkara.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian terhadap Indikator kegiatan ini antara lain :

Tabel 3.55 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Kendala/Hambatan/ Pendukung (saat ini)	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Target awal tahun adalah 2 (dua) perkara, akan tetapi karena pelaksanaan kegiatan penindakan dilaksanakan didalam kota Mamuju, sehingga sisa anggaran yang digunakan masih bisa di optimalkan untuk menangani perkara tambahan.	Semua kegiatan telah selesai dilaksanakan	Melaksanakan Review target Perkara dan Target Renstra dengan memperhatikan Kapasitas Sumber daya yang tersedia.	Desember 2023

SASARAN KEGIATAN 8

"Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 8 (SK8) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut ini penjelasan masing-masing indikator.

IKU 24. Indeks RB Balai POM di Mamuju

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%

2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi indeks RB Balai POM di Mamuju karena nilai akan keluar di akhir tahun. Hingga saat ini sudah dilakukan beberapa perbaikan dalam implementasi SAKIP mengingat form evaluasi penilaian SAKIP berubah.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-

Belum terdapat realisasi Nilai AKIP Balai POM di Mamuju hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan kinerja tahun 2022 yang harus dipertahankan sebagai berikut.

- Telah melakukan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Mamuju
- Pimpinan Balai POM di Mamuju terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan ZI
- Balai POM di Mamuju telah memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk pemberian pelayanan publik dengan WALI (WhatsApp Lincah).
- Rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat /pengembangan kompetensi lainnya
- Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala setiap Triwulanan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Walaupun capaian sudah melebihi target, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu:

- Mengoptimalkan pembangunan pada Area Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayananan Publik sehingga dapat mencapai syarat minimal penetapan WBK.

- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan ZI secara berkala dan berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) untuk masing-masing area perubahan serta menyusun pelaporan atas kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tersebut, sekaligus menetapkan RATL.
- Menetapkan target-target prioritas Pembangunan ZI yang relevan.
- Mengoptimalkan Laporan Kinerja dan dokumen monitoring kinerja sebagai sarana menyajikan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
- Mengoptimalkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tindak lajut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
- Melakukan reviu Standar Pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layananan.
- Menetapkan dan mengimplementasikan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar pada seluruh jenis layanan.
- Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan sesuai dengan karakteristik unit, dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.

- Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 3.56 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Tindak Lanjut		
Selesai*	Belum**	
	Rencana Aksi	*Timeline*
Desk tahap 1 dengan Inspektorat dan Perbaikan	- Menunggu hasil penilaian dan Keputusan Tim Penilai Internal (TPI) terkait rekomendasi menuju WBK ke KemenPAN RB	Desember 2023

IKU 25. Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Nilai AKIP Balai POM di Mamuju mengacu pada PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat

Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Balai POM di Mamuju merupakan mitra kerja Inspektorat I yang melakukan penilaian atas penerapan SAKIP Balai POM di Mamuju Tahun 2022.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Tabel 3.57 Komponen Penilaian AKIP

Komponen	Sub Komponen			
	Sub Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pengukuran Kinerja	4,8	7,2	12	24
Pelaporan Kinerja	2,4	3.6	6	12
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4	6	10	20
Capaian Kinerja	-	-	-	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	100

Keterangan: bobot komponen dan sub komponen diatas merupakan bobot penilaian untuk evaluasi SAKIP Satuan Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sumber : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.58 Capaian Indikator Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-

Sampai dengan triwulan I belum terdapat realisasi Nilai AKIP Balai POM di Mamuju karena nilai akan keluar di akhir tahun. Hingga saat

ini sudah dilakukan beberapa perbaikan dalam implementasi SAKIP mengingat form evaluasi penilaian SAKIP berubah.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.59 Capaian Indikator Nilai AKIP Balai POM di Mamuju

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
				Realisasi				
IKSK8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	79.40	-	-	-	-	-	-

Belum terdapat realisasi Nilai AKIP Balai POM di Mamuju hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kedepannya upaya perbaikan yang telah dilakukan dapat dipertahankan dan inovasi SAMBUSA yang telah ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kedepannya perlu dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP atas implementasi SAKIP 2022 dan hasil rekomendasi APIP SAKIP tahun 2022 akan diterapkan di tahun 2023 sebagai upaya perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai sesuai target Renstra.

Adapun kegiatan yang harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan realiasasi IKU Nilai AKIP yaitu melaksanakan rapat secara berkala dan insidental, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indikator ini yaitu dengan mengadakan dialogal kinerja antara pegawai dan pimpinan serta cascading kinerja hingga level individu / pegawai. Selain itu adanya peningkatan kompetensi baik melalui bimtek, asistensi pusat atau pun diseminasi secara berkala dan konsisten juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya IKU ini.

Mindset pegawai dan komitmen pimpinan akan pentingnya pencapaian IKU ini juga harus tetap dipertahankan melalui kegiatan peningkatan kegiatan yang dapat meningkatkan *engagement* antara organisasi dan pegawainya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2022, BPOM di Mamuju telah berhasil menaikkan nilai AKIP Pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan upaya penyusunan SKP melalui dialogal kinerja dan cascading IKU Kepala Balai hingga level pegawai, selain itu juga telah terlibat dalam Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja, adanya rapat evaluasi/koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan dan anggaran sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan yang melibatkan Biro SDM untuk menyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) Level Individu Balai POM di Mamuju.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.60 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
-Koordinasi dengan Rorenkeu terkait SK PJ Data Pusat untuk menyusun SK Balai - Penunjukan verifikator data sesuai fungsi dari PJ Monev tahun yang lalu - Perlu peningkatan kerja sama TIM dan pendelegaian tugas jika ybs tidak bisa menyelesaikan tugasnya agar nilai Balai tidak menurun - Menyusun RATL SAKIP 2022 (belum ada permintaan Insp namun disiapkan) - BA Evaluasi Internal - Lapkin Interim Triwulan I	- Koordinasi dengan Rorenkeu bulan 3, SK PJ Data sedang di Biro Hukor	- Koordinasi dengan Rorenkeu bulan 3, SK PJ Data sedang di Biro Hukor - Penyusunan SK PJ Data Balai - Koordinasi dengan rorenkeu - Penunjukan verifikator data sesuai fungsi dari PJ Monev tahun yang lalu - Perlu peningkatan kerja sama TIM dan pendelegaian tugas jika ybs tidak bisa menyelesaikan tugasnya agar nilai Balai tidak menurun -Penyusunan RATL Sakip 2022 - BA Evaluasi Internal - Lapkin Interim Triwulan I	April 2023-Juni 2023 April-Juni 2023 Mei 2023 17 April 2023 18 April 2023

SASARAN KEGIATAN 9

"Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 9 (SK9) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju.Dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
   1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
   2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
   3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
   4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 tahun 2023 disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut.

IKU 26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.61 Capaian Sasaran Kegiatan 9.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal				-	-	-

Capaian Indeks Profesionalitas ASN belum tercapai di triwulan I karena akan terealisasi di akhir tahun oleh Biro SDM BPOM. Namun telah dilakukan upaya pemantauan peningkatan kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam pelatihan baik daring maupun luring.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.62 Capaian Indikator Nilai IP ASN Balai POM di Mamuju

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	-	-	-	-	-	-
SK9 Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal				-	-	-	-

Belum terdapat realisasi Nilai IP ASN Balai POM di Mamuju hingga triwulan I tahun 2023 sehingga belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator IP ASN Tahun 2022 disebabkan karena adanya penunjukan penanggungjawab serta adanya casacading hingga level individu. Selain itu pemantauan yang dilakukan setiap bulan baik melalui rapat evaluasi kinerja rutin, pengumuman di WhatApps Group Balai POM di Mamuju dan koordinasi aktif diluar pertemuan rutin bai kantar pegawai Balai POM di Mamuju maupun dengan pusat. Dalam pelaksanaan sebenarnya ada kendala terkait perubahan struktur organisasi dan tata kelola yang mengubah eselon IV menjadi fungsional dan rata-rata pada zamannya belum ada diklat fungsional. Namun telah dilakukan koordinasi dan ada kebijakan khusus terkait fungsional PFM sehingga realisasi dapat meningkat dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kedepannya diharapkan dapat dilakukan sosialisai IKU diawal tahun melalui rapat atau dialogal kinerja, penunjukan penanggungjawab setiap IKU serta setiap IKU harus dicascading hingga level individu serta mempertahankan kesadaran masing-masing pegawai terkait dengan pentingnya pencapaian kinerja.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tahun 2023, Balai POM di Mamuju berhasil mencapai target hal ini disebabkan karena adanya rapat awal tahun dan dialogal kinerja yang melibatkan pimpinan dan pegawai, adanya penunjukan penanggungjawab IKU, adanya cascading IKU sampai dengan level individu, rapat monev bulanan serta koordinasi aktif kepada setiap pegawai yang memiliki nilai IP Rendah atau dibawah target yang diumumkan setiap bulan di WAG Balai POM di Mamuju.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.63Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	Tindak Lanjut		
	Selesai*	Belum**	
		Rencana Aksi	*Timeline*
Monitoring JP tiap bulan Kesadaran pegawai Fungsional yang sudah diangkat mengikuti diklat fungsional s.d des 2023	Monitoring JP tiap bulan	Monitoring JP tiap bulan Kesadaran pegawai Fungsional yang sudah diangkat memastikan memiliki kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat fungsional s.d des 2023	Desember 2023

SASARAN KEGIATAN 10

"Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 10 (SK10) didasarkan pada penilaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Berikut ini Analisa atas setiap Indikator Kinerja SK10.

IKU 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Untuk menjamin penerapan Sistem Regionalisasi Laboratorium maka telah dilakukan penyesuaian penilaian Standar Kemampuan Laboratorium. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan di Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai standar yang ditetapkan , maka telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratoriumm Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai acuan dalam penilaian Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kegiatan lapangan maupun penilaian mandiri di Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan sekaligus mencabut Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Badan POM adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang

harus dipenuhi oleh setiap laboratorium Badan POM dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar tersebut atau mendapatkan profil/peta kemampuan laboratorium Badan POM maka dilakukan monitoring dan evaluasi setiap laboratorium Badan POM. Selain itu juga untuk meyakinkan bahwa data hasil uji andal dan valid yang dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum dalam rangka pengawasan obat dan makanan secara komprehensif.

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice (GLP)* yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 57 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.64 Capaian Indikator Kinerja 27

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	-	-	-	-	-

No	Komponen	TW I
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	51.47
2	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	66.17
3	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	44.44
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (%)		**54.02**

Sumber : Monev Capaian SKL BPOM 2023 (BPOM di Mamuju

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	45.91
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	79.18
3	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)	42.08
Persentase Pemenuhan SKL (%)		55.72

Sumber : Monev Capaian SKL BPOM di Mamuju 2022 tgl 26 desember 2022

Berdasarkan hasil penilaian dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), persentase Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP untuk Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 54.02%, dengan rincian sebagai berikut: persentase pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 51.47%; persentase pemenuhan standar kompetensi sebesar 66.17% dan persentase pemenuhan standar peralatan sebesar 44.44%.

Jika dibandingkan hasil penilaian dari PPPOMN tahun 2022 dan 2023 pada kedua table diatas terlihat bahwa kenaikan persentase

SKL terjadi pada pemenuhan SRL dari dan peralatan sementara untuk persentase pemenuhan kompetensi mengalami penurunan dari 79.18% tahun 2022 menjadi 66.17% tahun 2023.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indikator sasaran ini dilakukan melalui penilaian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang dilakukan disetiap triwulan. pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pemenuhan Standar Ruang Lingkup

Persentase pemenuhan SRL (Standar Ruang Lingkup) di triwulan I tahun 2023 untuk setiap komoditi rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan dengan persensetase pemenuhan SRL tahun 2022. Persentase Pemenuhan SRL untuk pengujian Kimia komoditi obat sebesar 77,3% komoditi kosmetik sebesar 41,7%; Komoditi OTSK sebesar 68%; komoditi pangan 59,3%; Sedangkan pengujian mikrobiologi untuk komoditi kosmetik,pangan dan OTSK sebesar 41.3%. Sehingga rata-rata nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 51,47%. Terdapat peningkatan persentase pemenuhan standar ruang lingkup di triwulan 1 tahun 2023 disebabkan oleh:

- Adanya penambahan alat laboratorium microwave dan MVU sehingga parameter uji logam produk kosmetik dan pangan dapat dilakukan
- Adanya penambahan jenis sampling komoditi obat
- Penambahan data dukung terkait pengujian OTSK yang sebenarnya telah dilakukan pengujiannya di tahun 2022 namun karena belum terkonfirmasi sehingga tidak terhitung saat dilakukan monev di tahun 2022

- Keikutsertaan dalam kegiatan uji banding ataupun uji profisiensi yang dilaksanakan oleh PPPOMN

2) Pemenuhan Standar Kompetensi

Untuk Penilaian Triwulan 1 tahun 2023 persentase Pemenuhan Kompetensi sebesar 66,17%, nilai ini menunjukkan adanya penurunan dari persentase penilaian tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya penambahan pegawai baru yang nilai persentase kompetensinya rata-rata dibawah 60% pada nilai keterampilan dasar PFM Mahir,penyelia dan pertama.

3) Pemenuhan Standar Alat Laboratorium

Peralatan terdiri dari peralatan pengujian dasar, peralatan penunjang dan peralatan pengujian spesifik. Penilaian terhadap pemenuhan standar peralatan terdiri atas perlatan kimia dan peralatan Biologi. Persentase pemenuhan standar peralatan untuk pengujian kimia sebesar 49,9%, persentase pemenuhan standar peralatan untuk pengujian biologi sebesar 38,9%. Sehingga rata-rata nilai pemenuhan peralatan sebesar 44,44%. Pemenuhan standar alat laboratorium telah mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2022. Peningkatan persentase pemenuhan alat laboratorium di triwulan I ditunjang oleh adanya percepatan pengadaan dan perencanaan pengadaan yang berbasis pemenuhan SKL

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

BPOM di Mamuju khususnya kelompok substansi pengujian telah melakukan beberapa kegiatan atau program yang bertujuan untuk mendorong keberhasilan pencaaian kinerja. Kegiatan tersebut diantaranya

- Membuat usulan pengadaan alat dengan berbasis pada pemenuhan SKL

- Membuat perencanaan pemenuhan kompetensi untuk pegawai baru dalam bentuk kepenyeliaan dan penugasan pengujian terhadap parameter uji yang terkait dengan pemenuhan pengetahuan dan keterampilan PFM Mahir, PFM penyelia dan PFM pertama.
- Membuat Perencanaan Pelatihan untuk tahun 2023 melalui zoom terkait kalibrasi alat sehingga menambah nilai pemenuhan kompetensi terkait pengetahuan dasar untuk seluruh pegawai
- Revisi anggaran jika diperlukan untuk perencanaan pelatihan internal kepada personil pengujian mikrobiologi di triwulan 4 yang masih rendah persentase pemenuhan kompetensi pengetahuan dan keterampilannya terkait verifikasi metode Analisa di semua tingkat PFM.
- Optimalisasi sisa anggaran pengadaan alat laboratorium sesuai standar GLP untuk menunjang ketersediaan peralatan yang berkontribusi pentng pada kapasitas laboratorium.

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

1. Standar Ruang Lingkup : akan dilakukan monitoring terhadap realisasi perencanaan penambahan ruang lingkup oleh semua komoditi
2. Kompetensi personel : Peningkatan pengetahuan melalui pelaksanaan pelatihan di Triwulan II dan IV, serta peningkatan Keterampilan melalui kepenyeliaan dan pengujian bagi personel penguji kimia dan penguji biologi.
3. Optimalisasi anggaran Alat laboratorium Pengawasan Obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practices, sisa dari pelaksanaan pengadaan Alat Laboratorium baik pengadaan melalui tender maupun pengadaan melalui e-Katalog

Kendala/ Hambatan/ Pendukung	Rekomendasi (Selanjutnya)	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	*Timeline*
Secara umum masih on track, untuk kendala ada pada persentase pemenuhan kompetensi dengan nilai dibawah 60%.	Monitoring realisasi terhadap perencanaan pemenuhan kompetensi pengetahuan dan keterampilan disetiap triwulan	Monitoring mandiri capaian kinerja	Pegawai baru akan diberi kepenyeliaan yang dapat meningkatkan kompetensinya	Desember 2023

IKU 28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
    - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
    - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
    - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan

1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.
2. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal diperoleh dari Nilai Asesment Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0,00 – 0,75 : Sangat Kurang

a. Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.65 Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang Optimal Triwulan I

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,50	2,60	104,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Triwulan I tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang Optimal dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan nilai indeks 2,6. Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal tersebut

dengan capaian 104%, capaian ini masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi dengan simpulan efektivitas adalah efektif. Data di atas diambil dari website Badan POM Operational Center.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Tabel 3.66 Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang Optimal Triwulan I dan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,50	2,50	2,60	104,00	104,00	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang Optimal Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target akhir tahun 2023 yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan simpulan efektivitas adalah efektif.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun hal-hal yang harus dipertahankan untuk meningkatkan kinerja/capaian indikator ini yaitu:

- Adanya cascading indikator kinerja organisasi hingga level individu sangat mendukung capaian indikator
- Konsistensi dan kesadaran setiap pegawai akan target kinerjanya
- Penginputan dan verifikasi data keracunan pada aplikasi SPIMKER tapat waktu
- Setiap fungsi berperan aktif dalam membuat berita aktual setiap bulannya.
- Komunikasi aktif antara Pusat dan Balai, serta sharing knowledge antar Balai

- Pemantauan semua komponen dan aspek penilaian setiap bulannya.
- Koordinasi dengan petugas operator, koordinator dan ketua tim terkait untuk meningkatkan konsistensi penginputan melalui SIPT.
- Melakukan absensi ketidakaktifan pegawai dalam penggunaan email corporate

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal antara lain :

- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala minimal triwulanan untuk membahas penilaian indeks , kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- Pelaporan ataupun pengaduan terkait aplikasi SIPT dan aplikasi lainnya melalui itsm.pom.go.id

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 3.67 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Mamuju yang Optimal

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
-Penyampaian pada WAG terkait capaian rendah dan capaian bulanan	Telah dilakukan capaian pada WAG secara berkala	Diskusi aspek penilaian yang masih rendah	Mei 2023

SASARAN KEGIATAN 11

"Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel"

Pengukuran kinerja dari Sasaran Kegiatan 11 (SK11) didasarkan pada penilaian terhadap 1 (satu) indikator kinerja yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Mamuju. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bersifat flat dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang bersifat kumulatif. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian indikator ini dihitung dengan rumus Berikut.

Nilai Kinerja Anggaran BPOM =

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.68 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11.1

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Kriteria Capaian Triwulan	SIMPULAN EFEKTIVITAS
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	30,00	68,43	228,11	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel				**228,11**	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju pada triwulan I tahun 2023 sebesar 228,11% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, namun jika dibandingan dengan target tahunan maka realisasi ini masih dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut dijelaskan lebih detail terkait indikator ini.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Akhir Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Target Triwulan I	Realisasi	Capaian Triwulan I (%)	Capaian Tahunan (%)
IKSK11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	30,00	68,43	228,11	72,57
SK11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel				**228,11**	**72,57**

Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju pada triwulan I jika dibandingkan dengan target tahunan dengan capaian masih dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut dijelaskan lebih detail terkait indikator ini.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian EKA Triwulan I Tahun 2023 sebesar 47,39 dengan komponen terendah yaitu nilai CRO sebesar 7,39. Hal ini disebabkan karena adanya capaian output yang belum optimal karena masih berproses dalam triwulan. Berikut ini merupakan grafik capaian EKA.

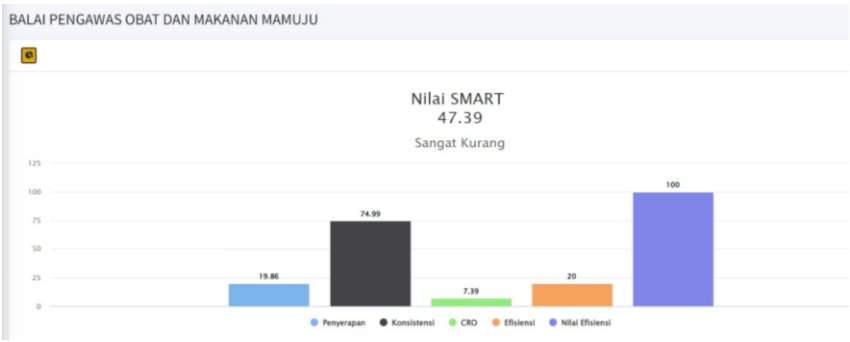

Gambar 3.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023
Sumber: Smart DJA Per 10 April 2023

Terkait dengan capaian IKPA Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100,00 data tersebut diambil pertanggal 31 Maret 2023. Faktor yang menyebabkan optimalnya nilai IKPA yaitu karena adanya cascading IKU Kepala Balai hingga level detail individu serta adanya awareness tiap pegawai akan kinerjanya yang mendukung nilai IKPA. Berikut ini merupakan tabel rinci nilai IKPA Triwulan I Tahun 2023.

Tabel 3.69 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	178	063	419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

Sumber : Aplikasi Omspan Per 10 April 2023

Capaian IKPA memang sudah optimal akan tetapi Balai POM Mamuju masih memerlukan upaya untuk mempertahankan capaian nilai IKPA tersebut karena komponen penyerapan anggaran komposisinya dalam IKPA cukup besar dan masih ada yang pelaksanaannya diluar kendali Balai POM di Mamuju seperti banyaknya kegiatan terpadu Pusat-Balai dengan pembiayaan sharing dan penyelenggaranya Pusat terkadang tidak dilakukan sesuai timeline dan sesuai kesepakan saat perencaan kegiatan, adanya kegiatan yang melibatkan mitra kerja DPR RI sebagai narasumber serta kegiatan prioritas nasional yang pelaksanaannya tahapan dapat selalu di monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai perencanaan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sampai dengan triwulan I terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- Adanya perubahan tata cara pengukuran kinerja dan indikator kinerja individu yang sudah selaras dengan IKU Kepala Balai dengan adanya intergrasi andtara Aplikasi Kinerja Individu (Simakin) dan Aplikasi Simetris (Aplikasi Pelaporan Capaian Kinerja Unit Kerja / Kpeapa Balai POM di Mamuju)
- Secara berkala telah dilaksanakan pemantauan terhadap capaian indikator-indikator pembentuk IKPA terutama terkait penyerapan anggaran dan capaian output yang memiliki bobot tinggi, dilaksanakan koordinasi dengan bagian terkait yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator IKPA di Tahun 2023
- Aktif berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dan Direktorat Jenderal Anggarran (DJA) Kemenkeu terkait pelaporan kinerja dan Kementerian Keuangan di Sulawesi Barat yang

bertanggung jawab terhadap nilai IKPA dan EKA melalui BImtek Mandiri yang melibatkan seluruh Ketua Tim Kerja dan Tim Tata Usaha BPOM di Mamuju

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Atas evaluasi sebelumnya berikut ini tabel tindak lanjut rekomendasinya.

Tabel 3.70 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi	**Tindak Lanjut**		
	Selesai*	**Belum****	
		Rencana Aksi	***Timeline***
-Menghubungi DJA via Layanan Chat -Peringatan kepada Tim yang blm mencapai 15% (harusnya berpengaruh pada belum ada capaian dalam SKP individu) -Konsistensi dan komitmen pimpinan melalui komunikasi dan koordinasi non formal -Reminder Bulanan Serapan anggaran	-Menghubungi DJA via Layanan Chat	-Peringatan kepada Tim yang blm mencapai 15% (harusnya berpengaruh pada belum ada capaian dalam SKP individu) -Konsistensi dan komitmen pimpinan melalui komunikasi dan koordinasi non formal -Reminder Bulanan Serapan anggaran	-Tiap Triwulan s.d Des 2023 Tiap bulan s.d Des 2023

3.6 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas keuangan Balai POM di Mamuju Triwulan I Tahun 2023 yaitu melalui penyampaian Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ke BPOM RI sebagai Eselon I.

Tabel 3.71 Realisasi Anggaran Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2023		
			Pagu Awal	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	114.607.000	400.000	0,35
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	55.000.000	-	0,00
3	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	920.472.000	164.614.198	17,88
4	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	128.842.000	43.029.800	33,40
5	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15.000.000	-	0,00
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	70.000.000	54.500.000	77,86
7	3165.EBA.962	Layanan Umum	229.279.000	151.131.229	65,92
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	472.550.000	37.798.815	8,00
9	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	185.770.000	67.216.669	36,18
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	741.398.000	60.482.144	8,16
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1.024.510.000	129.204.126	12,61
12	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	111.585.000	845.000	0,76
13	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	4.755.500.000	137.142.325	2,88

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2023		
			Pagu Awal	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	f	g	h=(g/fx100)
14	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	41.324.000	-	0,00
15	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	111.662.000	23.091.900	20,68
16	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	299.130.000	29.105.823	9,73
17	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	26.979.000	1.390.000	5,15
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	103.850.000	9.460.000	9,11
19	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	388.535.000	20.930.000	5,39
20	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	3.518.990.000	1.138.649.000	32,36
21	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.469.915.000	1.367.260.796	18,30
Jumlah			**20.784.898.000**	**3.436.251.825**	**16,53**

Sumber: Monev Anggaran, 2023

Berikut ini merupakan tabel realisasi anggaran per indikator kinerja.

Tabel 3.72 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	95.342.400,00	9.019.586,90	9,46
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30.441.000,00	6.675.710,00	21,93
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	95.342.400,00	9.019.586,90	9,46
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	30.441.000,00	6.675.710,00	21,93
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*	30.473.400,00	1.677.840,00	5,51

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	46.210.500,00	7.853.460,00	16,99
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	76.306.000,00	-	0,00
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	282.612.100,00	47.132.726,10	16,68
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	83.050.100,00	20.855.685,00	25,11
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	22.050.000,00	-	0,00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	22.050.000,00	-	0,00
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	37.904.000,00	-	0,00
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	51.200.000,00	9.460.000,00	18,48
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	186.750.000,00	15.665.000,00	8,39
15	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	94.955.000,00	80.042.700,00	84,30
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	61.324.000,00	-	0,00
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4.801.409.800,00	148.364.155,00	3,09
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	499.008.000,00	20.976.000,00	4,20
19	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.010.490.000,00	129.204.170,00	12,79
20	Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	111.585.000,00	845.000,00	0,76
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	124.648.000,00	11.822.229,20	9,48

Indikator Kinerja		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	38.112.800,00	8.697.060,00	22,82
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	282.591.500,00	67.616.669,00	23,93
24	Indeks RB Balai POM di Mamuju	476.308.500,00	150.057.090,60	31,50
25	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	316.574.000,00	55.292.714,80	17,47
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	388.743.500,00	101.962.970,50	26,23
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	3.959.758.000,00	1.174.061.315,00	29,65
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	317.680.000,00	106.150.283,20	33,41
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	7.211.537.000,00	1.247.124.162,80	17,29
Total		20.784.898.000,00	3.436.251.825,00	16,53

Sumber: Monev Anggaran 2023 Diolah Penyusun, 2023

Berikut ini grafik total realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2023

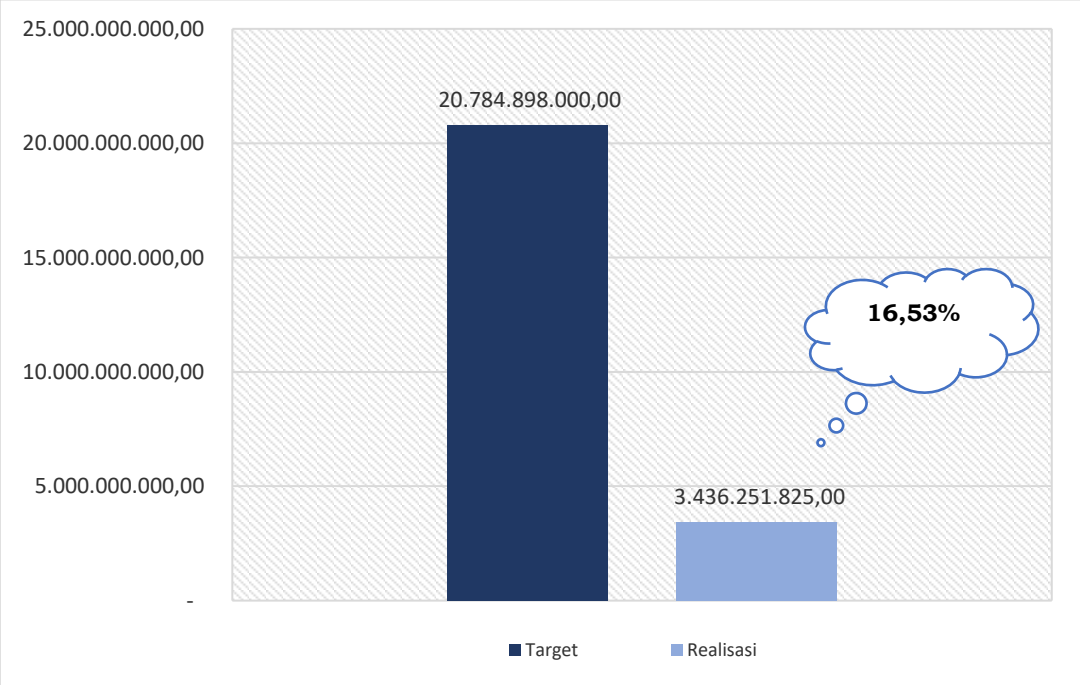

Gambar 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023
Sumber : Monev Anggaran 2023 Disusun oleh Penyusun, 2023

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen DIPA Balai POM di Mamuju Tahun 2023 sebesar Rp20.784.898.000,00 dengan realisasi

anggaran Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp3.436.251.825,00 atau 16,53%. Adapun Realisasi Anggaran Per Belanja sebagai berikut.

Tabel 3.73 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	063-419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	178	PAGU REALISASI PERSENTASE	5,355,000,000 904,208,560 (16.89%)	11,840,908,000 1,338,894,265 (11.31%)	3,588,990,000 1,193,149,000 (33.24%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	20,784,898,000 3,436,251,825 (16.53%)
				SISA	4,450,791,440	10,502,013,735	2,395,841,000	0	0	0	0	0	0	17,348,646,175
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	**5,355,000,000 904,208,560 (16.89%)**	**11,840,908,000 1,338,894,265 (11.31%)**	**3,588,990,000 1,193,149,000 (33.24%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**20,784,898,000 3,436,251,825 (16.53%)**
				SISA	**4,450,791,440**	**10,502,013,735**	**2,395,841,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,348,646,175**

Sumber: Aplikasi Omspan 31 Maret 2023

Balai POM di Mamuju telah berupaya mengelola anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan pengelolaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Mamuju dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran beserta pemenuhan kegiatan secara berkala bulanan dan rapat triwulanan
- Revisi anggaran dan kegiatan baik revisi POK atau DIPA secara berkala untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran kegiatan yang sudah tercapai
- Telah dilakukan peningkatan kompetensi staf terkait perencanaan, keuangan dan penganggaran
- Telah melakukan koordinasi aktif dengan penanggung jawab kegiatan terpadu terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Faktor pendukung optimalnya realisasi anggaran pada indikator IKPA maupun EKA sampai dengan triwulan I tahun 2023 antara lain:

- Komposisi belanja modal dari seluruh anggaran DIPA Tahun 2023 hanya sebesar 17,27% dan sudah direalisasikan sebesar 1.193.149.000,00 atau 33,24%
- Adanya subsidi silang realisasi antar belanja, sehingga target serapan minimal 15% dapat tercapai
- *Self-blocking* Pagu Anggaran Tahun 2023 yaitu pada KIE Thomas dan Tunjangan Kinerja yang kebetulan alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan Pegawai kurang dari kebutuhan sampai dengan Desember 2023
- Adanya cascading kinerja yang diturunkan sampai detail per pegawai

Agar realisasi anggaran tetap optimal perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Melakukan rapat rutin untuk memastikan kegiatan diselesaikan tepat waktu sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan
- Secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kegiatan dan anggaran dimasing-masing Ketua Tim melalui *google sheet* yang telah disediakan serta melakukan pemantauan setiap rutin dan segera melakukan revisi atau realokasi anggaran jika kegiatan tidak akan dilaksanakan
- Melakukan update Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan
- Meningkatkan konsistensi ketua tim sebagai penanggung jawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan melakukan pertanggungjawaban dengan cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku
- Mereviu kembali kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dan berkoordinasi secara berkala dengan penanggungjawan kegiatan pusat
- Peningkatan kompetensi SDM secara berkala termasuk SDM Teknis terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk

menyelaraskan realisasi kegiatan dan anggaran yang melibatkan narasumber dari Kanwil DJPb Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju.

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dalam melakukan pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya, Balai POM di Mamuju melakukan perhitungan efisiensi capaian output indikator kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran sesuai kegiatan yang menjadi target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut.

3.7.1 Analisis Atas Efisiensi Kegiatan Per Rincian Output

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan tingkat efisiensi yang dihitung dengan membandingkan capaian output dan input penggunaan dana. Tabel di bawah ini merupakan tabel pengukuran efisiensi atas penggunaan sumber daya yang disajikan perindikator dan per sasaran kegiatan.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ CapaianInput}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{SE} = \frac{\%\ \text{Rencana capaian output}}{\%\ \text{Rencana Capaian input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE $\geq$ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% → Efisien
- 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
- 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
- 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
- 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
- 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
- 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
- 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
- 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
- > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Mamuju tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.74 Tingkat Efesiensi Kegiatan Per Rincian Output

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2023		TE	Katagori
			Volume (Output)	Dana (Input)		
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	21,43	0,35	60,40	TIDAK EFISIEN
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100,00	0,00	#DIV/0!	TIDAK TERHITUNG
3	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25,00	17,88	0,40	EFISIEN
4	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	29,41	33,40	-0,12	TIDAK EFISIEN
5	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,00	0,00	#DIV/0!	TIDAK TERHITUNG
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	90,91	77,86	0,17	EFISIEN
7	3165.EBA.962	Layanan Umum	25,00	65,92	-0,62	TIDAK EFISIEN
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25,00	8,00	2,13	TIDAK EFISIEN
9	3165.QCD.U73	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM MAMUJU	200,00	36,18	4,53	TIDAK EFISIEN
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20,00	8,16	1,45	TIDAK EFISIEN
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	20,00	12,61	0,59	EFISIEN
12	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	25,00	0,76	32,01	TIDAK EFISIEN
13	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	2,03	2,88	-0,30	TIDAK EFISIEN
14	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10,00	0,00	#DIV/0!	TIDAK TERHITUNG
15	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	4,17	20,68	-0,80	TIDAK EFISIEN

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	2023		TE	Katagori
			Volume (Output)	Dana (Input)		
16	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	6,95	9,73	-0,29	TIDAK EFISIEN
17	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	20,00	5,15	2,88	TIDAK EFISIEN
18	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	27,27	9,11	1,99	TIDAK EFISIEN
19	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	34,29	5,39	5,36	TIDAK EFISIEN
20	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	39,39	32,36	0,22	EFISIEN
21	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	25,00	18,30	0,37	EFISIEN
Jumlah			**2,74**	**16,53**	**-0,83**	**TIDAK EFISIEN**

Sumber: Monev 2023 Diolah Penyusun, 2023

Pada tahun 2023 Balai POM di Mamuju melaksanakan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan utama / Rincian Output (RO) untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 19 kegiatan tidak efisien dan 5 kegiatan efisien dan 3 kegiatan tidak terhitung karena dalam pencapaiannya belum menggunakan anggaran. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,29 sampai 60,40. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh GAP serapan anggaran dan realisasi kegiatan yang tidak selaras dan dengan deviasi yang cukup tinggi. Jika dilihat secara umum kinerja Balai POM di Mamuju masuk ke dalam katagori tidak efisien disebabkan karena Output KIE yang jumlahnya cukup banyak pelaksanaannya mundur di Triwulan II menggikuti jadwal dari Mitra Kerja DPR RI .

3.7.2 Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis. Berikut ini Tingkat Efesiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja

Tabel 3.75 Tingkat Efesiensi Kegiatan Per Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Output	Input (anggaran)	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	105,82	9,46	10,19	75 %	TIDAK EFISIEN
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	45,45	21,93	1,07	86 %	TIDAK EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	113,64	9,46	11,01	75 %	TIDAK EFISIEN
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	0,00	21,93	-1,00	75 %	TIDAK EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	111,11	5,51	19,18	75 %	TIDAK EFISIEN
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK BISA DIHITUNG
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	113,96	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK BISA DIHITUNG
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	116,28	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK BISA DIHITUNG
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	95,24	18,48	4,15	75 %	TIDAK EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	122,02	8,39	13,55	75 %	TIDAK EFISIEN
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi	18,00	0,00	-1,00	75 %	TIDAK EFISIEN

No	Indikator Kinerja	Output	Input (anggaran)	TE	Capaian TE	Kriteria
	pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik					
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100,16	3,09	31,41	75 %	TIDAK EFISIEN
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	29,41	4,20	6,00	75 %	TIDAK EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	80,00	12,79	5,26	75 %	TIDAK EFISIEN
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	625,00	0,76	824,33	75 %	TIDAK EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	15,26	9,48	0,61	90 %	EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	10,29	22,82	-0,55	75 %	TIDAK EFISIEN
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	55,56	23,93	1,32	84 %	TIDAK EFISIEN
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	104,00	33,41	2,11	75 %	TIDAK EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	72,57	17,29	3,20	75 %	TIDAK EFISIEN
TOTAL		73,78	11,95	5,18	75 %	TIDAK EFISIEN

Sumber: Monev 2023 Diolah Penyusun, 2023

Pada tahun 2023 Balai POM di Mamuju melaksanakan 29 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari 29 Indikator Kinerja, hanya 20 indikator kinerja yang terhitung pada triwulan I tahun 2023. Secara umum capaian efisiensi berdasarkan indikator kinerja yaitu Tidak Efisien. Dari 20 Indikator Kinerja terdapat 16 Indikator yang Tidak Efisien, 1 Indikator Efisien dan 3 Indikator Tidak Terhitung karena dalam pencapaian tahapan indikator tersebut belum menggunakan angaran pada triwulan I. Pencapaian kriteria ini disebabkan penyerapan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan pencapaian output.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim ini disusun sebagai bentuk progress pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Balai POM di Mamuju kepada Kepala BPOM RI dan pihak-pihak terkait. Selain itu laporan ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk mencapai kinerja di tahun 2023. Pada tahun 2021 adanya Gempa Bumi yang menyebabkan perubahan yang signifikan dalam tahapan perencanaan pembangunan gedung BPOM di Mamuju sehingga sampai saat ini proses administrasi perkantoran dilakukan dengan memanfaatkan 3 (tiga) gedung laboratorium.

Peristiwa gempa bumi tersebut diubah menjadi sebuah titik balik dan kekuatan untuk dapat menjadi lebih kompak dalam memberikan pelayananan dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Tahun 2023 Balai POM di Mamuju telah berhasil mencapai Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total sebesar 126,50% dengan kriteria ”Tidak Dapat Disimpulkan”. Capaian ini didukung oleh penerapan sistem pelaporan kinerja yang sudah terintegrasi dari perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan dalam Aplikasi SIMETRIS dan SKP di SIASN yang memfasilitiasi *cascading* indikator kinerja hingga level individu.

Pada Triwulan I Tahun 2023, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra Balai POM di Mamuju tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 21 kegiatan utama yang tertuang dalam dokumen DIPA. Sampai dengan triwulan I Terdapat 3 Sasaran Kegiatan dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI yaitu:

- SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

- SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju

2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria capaian TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI yaitu:

- SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
- SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju. Selain itu pada triwulan I juga terdapat 2) Sasaran Kegiatan dengan kriteria capaian TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Adapun hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

m. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 75,20% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan bahwa BPOM di Mamuju perlu melakukan evaluasi target triwulan I agar dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BPOM di Mamuju triwulan I Tahun 2023

n. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun BPOM di Mamuju sampai triwulan I telah konsistendalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Mamuju

o. Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2023, hasil akan diperoleh pada hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun triwulan I tahun 2023 Balai POM di Mamuju telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

p. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 107,92% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan keberhasilan

BPOM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju

q. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,04% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, hal ini menunjukkan keberhasilan Balai POM di Mamuju dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
r. Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 69,99% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, sehingga perlu dilakukan evaluasi target dan capaian triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
s. Capaian indikator sasaran strategis ketujuh sebesar 275.00% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dan dapat lebih intensif melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat agar pelaku kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju dapat menurun
t. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun sampai dengan triwulan I Balai POM di Mamuju tetap melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal
u. Belum ada capaian indikator sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada akhir tahun 2023, namun sampai dengan triwulan I tahun 2023 Balai POM di Mamuju tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal
v. Capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 104.00% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Namun terdapat 1 (satu) indikator yang akan tercapai di akhir tahun 2023 maka Balai POM di Mamuju harus tetap melakukan kegiatan dalam rangka untuk

menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

w. Capaian indikator sasaran strategis kesebelas sebesar 228,11% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan Tata Kelola Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel

x. Dari 21 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 13 kegiatan yang Tidak Efisien. Terkait dengan kegiatan yang tidak efisien hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang selisih antara realisasi kegiatan dan anggarannya terlalu tinggi. Balai POM di Mamuju perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan tingkat efisensi kegiatan Balai POM di Mamuju.

Terkait dengan anggaran, total anggaran DIPA Tahun 2023 Rp20.784.898.000 dengan Realisasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 3.436.251.825 atau 16,53%. Demi meningkatkan capaian kinerja, Balai POM di Mamuju terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan, dengan peningkatan kinerja dan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran

Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki capaian kinerja Balai POM di Mamuju perlu dilakukan beberapa upaya antara lain

1. Secara aktif melakukan inovasi-inovasi terkini agar tetap bekerja efektif dan efisien
2. Menindaklanjuti reviu terhadap target indikator kinerja ditahun berjalan
3. Melakukan reviu terhadap kegiatan terpadu yang tidak terlaksana dengan penanggungjawab pusat
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang ada di wilayah kerja Balai POM di Mamuju
5. Konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan
6. Tetap melakukan proses cascading kinerja detail sampai level individu

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala minimal triwulan yang melibatkan pimpinan

LAMPIRAN

1. Target Kinerja Jangka Menengah Balai POM di Mamuju Tahun 2020-2024 (Reviu Renstra)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholders Perspective	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	79.90	80.8	83.6	86.6	90	92.3
			IKS K1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84.31	78	84	86	88	90
			IKS K1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	80	85	87	88	90
			IKS K1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	74.07	78	80	82	84	86
			IKS K1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	88	89	90	90
	SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat	IKS K2.1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	64.86	69	68	71	75	78

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		di wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
	SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	95.08	83	91.1	92.3	93.4	94.6
			IKS K3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	72.00	71	74	76.01	78.01	80.01
			IKS K3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	82.92	85	86.75	88.5	91	92
Internal Process Perspective	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	IKS K4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di	96.43	78	100	100	100	100

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju		wilayah kerja Balai POM di Mamuju						
			IKS K4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	66.23	52.6	64	71	78	85
			IKS K4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	20.00	80	82	84	86	88
			IKS K4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	85.00	50	60	65	70	75
			IKS K4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86.87	51	60	65	70	75
			IKS K4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	3.49	3.11	3.75	4.01	4.25	4.51

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
			IKS K4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar	-	-	-	53.33	55.56	61.11
	SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	96.10	77.63	89.5	91.3	93.1	95
			IKS K5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	13.69	16	40	54	68	82
			IKS K5.3	Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	5.00	5	12	18	25	31
			IKS K5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	1.00	1	2	3	4	5
	SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	IKS K6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	82	100	100	100	100

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100.00	75	100	100	100	100
	SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	IKS K7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	150.00	44	97	98	99	100
Learning and Growth Perspective	SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	IKS K8.1	Indeks RB Balai POM di Mamuju	61.05	85	64	65	66	67
			IKS K8.2	Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	73.37	80	75.4	77.4	79.4	81.4
	SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang	IKS K9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	82.94	75	82	82.5	83	83.5

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		REALISASI 2021	TARGET KINERJA (MENJADI)				
						2020	2021	2022	2023	2024
		berkinerja optimal								
	SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	IKS K10. 1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	45.00	70	53	58	63	68
			IKS K10. 2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	1.70	1.51	2	2.25	2.5	3
	SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	IKS K11. 1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	86.66	93	92.5	93.1	94.3	95.5

Sumber: Reviu Renstra 2020-2024, 2023

1. Rencana Kerja Tahunan 2023

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759

Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

NOMOR HK.02.02.33A.33A5.07.22.94 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bombu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , upikmamuju@gmail.com

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , uiakmamuju@gmail.com

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor HK.02.02.33A.12.21.2739 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM 13 Bonbu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com, ulpkmamuju@gmail.com

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Lintang Purba Jaya

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Barelu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , uptdmamuju@gmail.com

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
NOMOR HK.02.02.33A.33A5.07.22.94 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	84
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	75

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : [redacted]

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	86
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	70

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU
Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.15 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2322759
Email : bpommamuju@gmail.com , ujikmamuju@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Mamuju	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,56
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	93,1
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	68
		Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang	99

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAMUJU

Jl. Poros Mamuju - Kalukku, KM.13 Bambu, Kab. Mamuju - Sulawesi Barat, Telp. (0426) 2222759
Email : bpommamuju@gmail.com , ulpkmamuju@gmail.com

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	wilayah kerja Balai POM di Mamuju	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Mamuju	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Mamuju yang optimal	Indeks RB Balai POM di Mamuju	66
		Nilai AKIP Balai POM di Mamuju	79,4
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Mamuju yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Mamuju	83
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Mamuju sesuai standar GLP	63
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Mamuju yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Mamuju secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Mamuju	94,3

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI MAMUJU

Lintang Purba Jaya

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Mamuju
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suliyanto, SH.,MH
Jabatan : Kepala Balai POM di Mamuju
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 5 Januari 2023

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Suliyanto, SH.,MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Mamuju

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.01
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55.56
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.1
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	66
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.4
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	63
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	68
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.20,784,898,000.00

Mamuju, 5 Januari 2023

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Sulyanto, SH.,MH

3. RAPK Tahun 2023

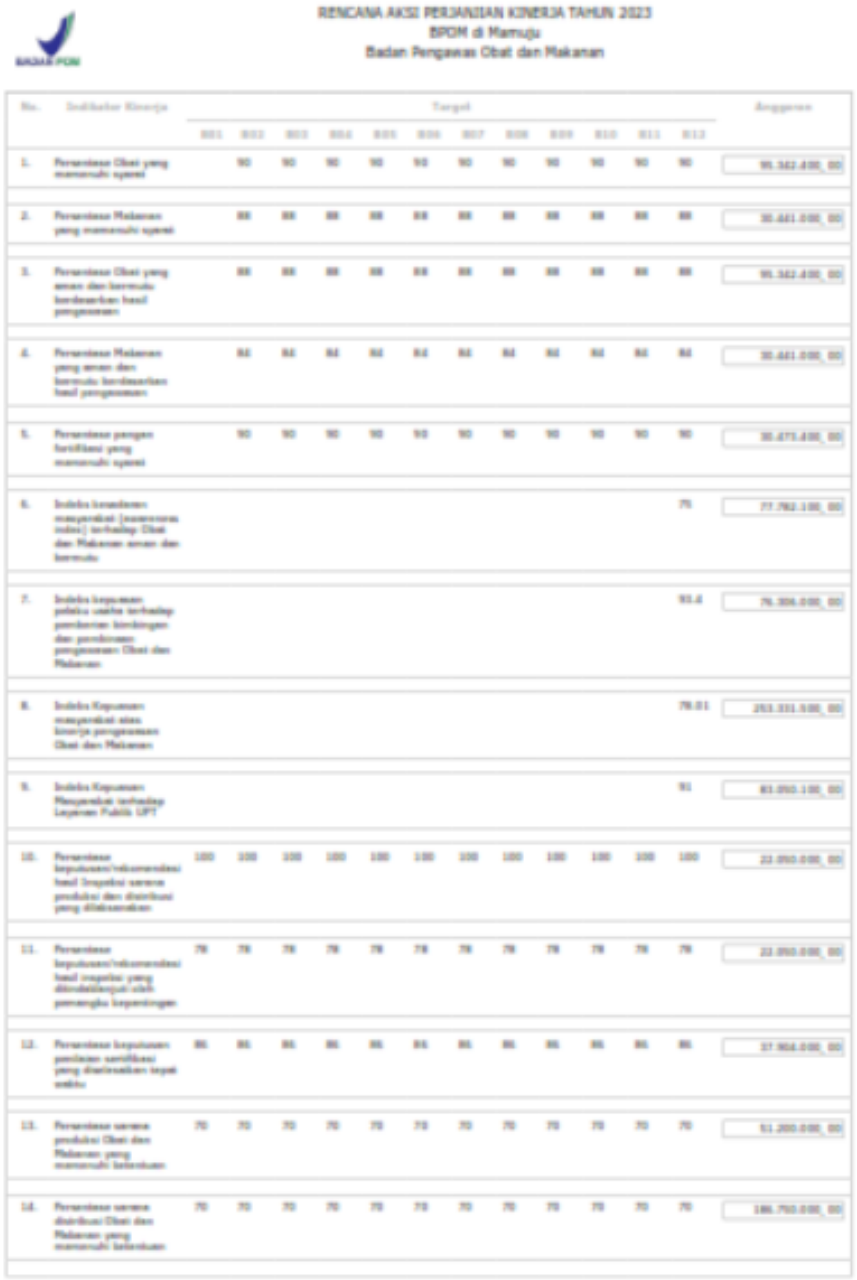

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Mamuju
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	99.342.400,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	30.441.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	99.342.400,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	30.441.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	30.471.600,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat [masyarakat sadar] terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												70	77.762.100,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembinaan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	76.306.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												78.01	253.331.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	83.050.100,00
10.	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.050.000,00
11.	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	22.050.000,00
12.	Persentase kepatuhan pemberi sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	37.904.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	51.200.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	186.750.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	94.364.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan CT dan Kosmetik yang baik	5	10	10	10	10	30	30	70	70	90	100	55.56	61.324.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIB Obat dan Makanan			93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	4.799.118.800,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	30	55	55	55	55	70	80	100	68	499.008.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	25	25	40	40	40	65	75	85	25	1.010.490.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.7	10.75	18.63	25.38	46.75	55.25	64.25	73.75	82.25	90.00	96.25	100	124.648.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6.4	12.75	17.73	26.45	48.26	59.30	70.35	78.49	86.63	94.19	98.26	100	38.112.800,00
22.	Persentase kebarhasilan pemindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	20	30	40	50	55	60	70	80	90	99	282.591.500,00
23.	Indeks RB UPT												66	480.808.500,00
24.	Nilai AKIP UPT												79.4	312.074.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	389.334.500,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												63	3.959.758.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	317.680.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		20	30	40	50	60	65	70	77	80	85	94.3	7.211.537.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	25	55	55	65	75	75	90	100	100	4	111.585.000,00
Total														20.784.898.000,00

Mamuju, 5 Januari 2023
Kepala Balai POM di Mamuju

Suliyanto, SH.,MH

4. Matriks Capaian RAPK

	Indikator	Target 2023	Target Bulanan			Realisasi s.d bulan JAN					Realisasi s.d bulan FEB					Realisasi s.d bulan MARET				
			JAN	FEB	MAR	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	20	21	95,24	105,82	105,82
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	-	88,00	88,00	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	2	5	40,00	45,45	45,45
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	-	88,00	88,00	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	7	7	100,00	113,64	113,64
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	-	84,00	84,00	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	Indikator	Target 2023	Target Bulanan			Realisasi s.d bulan JAN					Realisasi s.d bulan FEB					Realisasi s.d bulan MARET				
			JAN	FEB	MAR	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	-	90,00	90,00	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	0	0	Belum ada sampel yang selesai uji	#VALUE!	#VALUE!	10	10	100,00	111,11	111,11
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Indeks Kepuasan	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Indikator	Target 2023	Target Bulanan			Realisasi s.d bulan JAN					Realisasi s.d bulan FEB					Realisasi s.d bulan MARET				
			JAN	FEB	MAR	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun
	Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM																			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100.00	100.00	100.00	-	-	0	0,00	0,00	-	-	100	100,00	100,00	-	-	100	100,00	100,00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78.00	78.00	78.00	-	-	Belum ada rekomendasi	#VALUE!	#VALUE!	-	-	85,71	109,89	109,89	-	-	88,89	113,96	113,96
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	86,00	86.00	86.00	86.00	-	-	100,00	116,28	116,28	-	-	100,00	116,28	116,28	-	-	100,00	116,28	116,28
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70.00	70.00	70.00	0	0	Belum ada rekomendasi	#VALUE!	#VALUE!	2	4	50,00	71,43	71,43	6	9	66,67	95,24	95,24
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70.00	70.00	70.00	7	7	100,00	142,86	142,86	20	25	80,00	114,29	114,29	41	48	85,42	122,02	122,02

	Indikator	Target 2023	Target Bulanan			Realisasi s.d bulan JAN					Realisasi s.d bulan FEB					Realisasi s.d bulan MARET				
			JAN	FEB	MAR	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun
15	Indeks Pelayanan Publik	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,56	5,00	10,00	10.00	-	-	10,00	200,00	10,00	-	-	10,00	100,00	10,00	-	-	10,00	100,00	10,00
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,01	-	-	93,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,16	100,16	100,16
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68,00	5,00	10,00	20,00	-	-	5,00	100,00	5,00	-	-	10,00	100,00	10,00	-	-	20,00	100,00	20,00
19	Jumlah desa pangan aman	25,00	5,00	10,00	20,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	10,00	100,00	10,00	-	-	20,00	100,00	20,00
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4,00	5,00	10,00	25,00	-	-	2,50	50,00	2,50	-	-	15,00	150,00	15,00	-	-	25,00	100,00	25,00
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	4,70	10,75	18,63	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	8,31	77,33	8,31	-	-	15,26	81,91	15,26
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan	100,00	6,40	12,75	17,73	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	7,06	55,36	7,06	-	-	10,29	58,06	10,29

	Indikator	Target 2023	Target Bulanan			Realisasi s.d bulan JAN					Realisasi s.d bulan FEB					Realisasi s.d bulan MARET				
			JAN	FEB	MAR	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan	%Capaian thd Target tahun
	diuji sesuai standar																			
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	5,00	10,00	20,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	55,00	275,00	55,56
24	Indeks RB UPT	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT	79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6000	104,00	104,00
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,30	-	20,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	56,13	280,63	59,52	-	-	68,43	228,11	72,57

LAMPIRAN 6. DATA DUKUNG RHPK

1. PENGUJIAN

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Januari											s.d Februari												s.d Maret											
					Jumlah sampling Januari	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Jumlah sampling Februari	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai	Jumlah sampling Maret	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*					TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																																						
1	Obat	Random	Mamuju	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	24	0	0	0	0	24	8	8	0	0	16	8
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	24	0	0	0	0	24	8	8	0	0	16	8
		Targeted	Mamuju	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	4	2	2	0	0	2	2
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	28	0	0	0	0	28	10	10	0	0	18	10
2	Obat Tradisional	Random	Mamuju	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	16	0	0	0	0	16	11	10	1	1	5	11
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	16	0	0	0	0	16	11	10	1	1	5	11
		Targeted	Mamuju	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	1	7	4	4	0	0	3	4
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	1	7	4	4	0	0	3	4
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	23	0	0	0	1	23	15	14	1	1	8	15
3	Obat Kuasi	Random	Mamuju	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Targeted	Mamuju	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	Random	Mamuju	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1
		Targeted	Mamuju	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	2	1
5	Kosmetik	Random	Mamuju	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	19	0	0	0	0	19	1	1	0	0	18	1
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	19	0	0	0	0	19	1	1	0	0	18	1
		Targeted	Mamuju	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	12	0	0	0	0	12	1	1	0	0	11	1
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	12	0	0	0	0	12	1	1	0	0	11	1
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	31	0	0	0	0	31	2	2	0	0	29	2
6	Rokok	Targeted	Mamuju	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	Random	Mamuju	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	61	0	0	0	0	61	21	20	1	1	40	21
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	61	0	0	0	0	61	21	20	1	1	40	21
		Targeted	Mamuju	110	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	24	0	0	0	1	24	7	7	0	0	17	7
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	24	0	0	0	1	24	7	7	0	0	17	7
	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK		Mamuju	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	85	0	0	0	1	85	28	27	1	1	57	28
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	85	0	0	0	1	85	28	27	1	1	57	28
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																																						
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Mamuju	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	0	0	15	0	0	0	3	15	5	2	3	3	10	5
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	0	0	15	0	0	0	3	15	5	2	3	3	10	5
		Targeted	Mamuju	37	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	5	0	0	0	0	5	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	5	0	0	0	0	5	0
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	0	0	20	0	0	0	4	20	5	2	3	3	15	5
2	Fortifikasi	Targeted	Mamuju	50	0				0	0	0	0	0	0	0	0	10				0	10	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	10
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
										0	0			0	0	0						0	0			0	0	0						0	0			0	0	0
			TOTAL	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	10
	TOTAL PANGAN	Random		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	3	9	0	0	0	0	9	0	0	15	0	0	0	3	15	5	2	3	3	10	5
		Targeted		87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	15	0	0	0	1	15	10	10	0	0	5	10
		TOTAL		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	3	19	0	0	0	0	19	0	0	30	0	0	0	4	30	15	12	3	3	15	15

2. SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Mamuju	26	26	0	0	0	4	2	2	8	6	2
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	26	26	0	0	0	4	2	2	8	6	2
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Mamuju	280	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	280	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Mamuju		306	33	0	0	0	4	2	2	9	6	3
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		306	33	0	0	0	4	2	2	9	6	3

3. SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Mamuju	4	4	0	0	0	1	1	0	2	2	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	4	4	0	0	0	1	1	0	2	2	0
2	Apotek	Mamuju	196	15	0	0	0	4	4	0	6	6	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	196	15	0	0	0	4	4	0	6	6	0
3	Toko Obat	Mamuju	79	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	79	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Mamuju	7	7	0	0	0	1	0	1	2	1	1
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	7	7	0	0	0	1	0	1	2	1	1
5	Rumah Sakit (RS)	Mamuju	10	9	0	0	0	2	2	0	3	3	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	10	9	0	0	0	2	2	0	3	3	0
6	Puskemas	Mamuju	97	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	97	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klinik	Mamuju	45	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	45	5	0	0	0	0	0	0	3	3	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Mamuju	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Mamuju	37	8	2	2	0	2	2	0	2	2	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	37	8	2	2	0	2	2	0	2	2	0
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Mamuju	26	7	2	2	0	2	2	0	2	2	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	26	7	2	2	0	2	2	0	2	2	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Mamuju	99	23	3	3	0	3	3	0	9	9	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	99	23	3	3	0	3	3	0	9	9	0
13	Klinik Kecantikan	Mamuju	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Mamuju	647	47	0	0	0	10	6	4	19	13	6
		-			0			0			0		
		-			0			0			0		
		TOTAL	647	47	0	0	0	10	6	4	19	13	6
	Mamuju		1251	144	7	7	0	25	20	5	48	41	7
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL		1251	144	7	7	0	25	20	5	48	41	7

3. UMKM

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
MAMUJU	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	1		10	10	10									
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			0	0	0									
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			0	0	0									
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	0	0									
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0									
									10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	1		10	10	10									
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			0	0	0									
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			0	0	0									
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0									
	Total Progres								10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	9		10	10	10									
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0									
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			0	0	0									
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0	0	0									
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0									
	Total Progres								10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						**11**	**0**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Mamuju	0	0		1	1		2	2	
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	1	1	100,00	2	2	100,00
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Mamuju	0	0		0	0		0	0	
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Mamuju	0	0		5	6		6	7	
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	5	6	83,33	6	7	85,71
			Mamuju	0	0	0	6	7	85,71	8	9	88,89
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	6	7	85,71	8	9	88,89
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Mamuju	0	0		0	0				
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Mamuju	0	0		0	0				
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Mamuju	0	0		0	0				
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Mamuju	0	0		0	0				
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Mamuju	0	0		0	0				
			-									
			-									
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**Mamuju**	**0**	**0**	#DIV/0!	**6**	**7**	85,71	**8**	**9**	88,89
			-	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	#DIV/0!
			-	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**	#DIV/0!
			total	**0**	**0**	#DIV/0!	**6**	**7**	85,71	**8**	**9**	88,89

5. % PERKARA

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JANUARI									S.D. FEBRUARI									S.D. MARET								
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
MAMUJU	Mamuju	SPDP	2	4	0	2	0	1,00		0,15	15,00%	35,00%	100,00%	35,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	55,00%	100,00%	55,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	55,00%	100,00%	55,00
		Tahap I			2	0	0,50	0,00	0,4	20,00%						4	0	1,00	0,00	0,4	40,00%						4	0	1,00	0,00	0,4	45,00%			
		P21			0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%			
		Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	4	0	4	0								4	0	4	0								4	0	4	0							
	-	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00
		Tahap I					0	0	0,4	0%								0	0	0,4	0%								0	0	0,4	0%			
		P21					0	0	0,1	0%								0	0	0,1	0%								0	0	0,1	0%			
		Tahap II					0	0	0,15	0%								0	0	0,15	0%								0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0								0	0	0	0								0	0	0	0							
	-	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00
		Tahap I					0	0	0,4	0%								0	0	0,4	0%								0	0	0,4	0%			
		P21					0	0	0,1	0%								0	0	0,1	0%								0	0	0,1	0%			
		Tahap II					0	0	0,15	0%								0	0	0,15	0%								0	0	0,15	0%			
		Total	0	0	0	0								0	0	0	0								0	0	0	0							
	TOTAL	SPDP	2	4	0	2	0	1,00		0,15	15,00%	35,00%	100,00%	35,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	55,00%	100,00%	55,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	55,00%	100,00%	55,00
		Tahap I			2	0	0,50	0,00	0,4	20,00%						4	0	1,00	0,00	0,4	40,00%						4	0	1,00	0,00	0,4	45,00%			
		P21			0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,1	0,00%			
		Tahap II			0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%						0	0	0,00	0,00	0,15	0,00%			
		Total	4	0	4	0				0%				4	0	4	0				0,00%				4	0	4	0				0%			

6. PJAS

No	UPT	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)											
								s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
29	Mamuju		1	Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April			5,00	10,00	20,00									
			2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00									
			3	Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00									
			4	Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00									
			5	Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00									
				- Pembentukan Tim Keamanan																
				- Intervensi Keamanan Pangan																
			6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00									
			7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00									
		Total skor (Tahun N)		**100,00**		**0**	**0**	5,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. DESA

No	UPT	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (%)											Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
29	Mamuju		1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april			5,00	10,00	20,00									
			2	Pengadaan paket informasi keamanan	5,00	Jan-april			0,00	0,00	0,00									
			3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	April - Juli			0,00	0,00	0,00									
			4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre	15,00	Mei - Okt			0,00	0,00	0,00									
			5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov			0,00	0,00	0,00									
			6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10,00	Mei-Nov			0,00	0,00	0,00									
			7	Monitoring dan Evaluasi	15,00	Nov - Des			0,00	0,00	0,00									
			8	Pengawalan	10,00	Juni - Des			0,00	0,00	0,00									
		Total		**100,00**		**0**	**0**	**5,00**	**10,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

8. PASAR

No	UPT	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun
								Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
29	Mamuju		1	Adokasi	20,00	Jan - Apr			5,00	10,00	20,00									
			2	Survey Pasar	5,00	Jan			0,00	0,00	5,00									
			3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei			0,00	0,00	0,00									
			4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20,00	Apr			0,00	0,00	0,00									
			5	Penyuluhan	5,00	Juni - Juli			0,00	0,00	0,00									
			6	Kampanye	5,00	Juni - Juli			0,00	0,00	0,00									
			7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00	Sept - Okt			0,00	0,00	0,00									
			8	Lomba Pasar Aman	10,00	Des			0,00	0,00	0,00									
		Total		**100,00**		**0**	**0**	**5,00**	**10,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

9. SAMPEL OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR

No	UPT	s.d Januari							s.d Februari							s.d Maret						
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
64	Mamuju	403	0	Benar	403	0	Benar	0,00	403	41	Benar	403	26	Benar	8,31	403	85	Benar	403	38	Benar	15,26

No	UPT	s.d Januari							s.d Februari							s.d Maret						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
64	Mamuju	170	0	Benar	170	0	Benar	0,00	170	19	Benar	170	5	Benar	7,06	170	30	Benar	170	5	Benar	10,29

10. CAPAIAN INDIKATOR BALAI

No	UPT	Indikator 10			Indikator 12									Indikator 17			Indikator 28			Indikator 29								
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu									Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			Nilai Kinerja Anggaran UPT								
					s.d Jan			s.d Feb			s.d Mar									s,d Jan			s.d Feb			s.d Mar		
		s.d. Jan	s.d. Feb	s.d. Mar	Jumlah keputusan tepat waktu	Jumlah permohonan	% Capaian	Jumlah keputusan tepat waktu	Jumlah permohonan	% Capaian	Jumlah keputusan tepat waktu	Jumlah permohonan	% Capaian	s.d. Jan	s.d. Feb	s.d. Mar	s.d. Jan	s.d. Feb	s.d. Mar	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
29	Mamuju	0	100	100	3	3	100	6	6	100	8	8	100	-	-	93,16	-	-	2,6000	-	-	-	37,93	83,42	56,13	47,39	100,00	68,43